



**PENGARUH UPAH MINIMUM, PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB), DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:
Ika Rahmawati
150810101103

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PENGARUH UPAH MINIMUM, PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB), DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

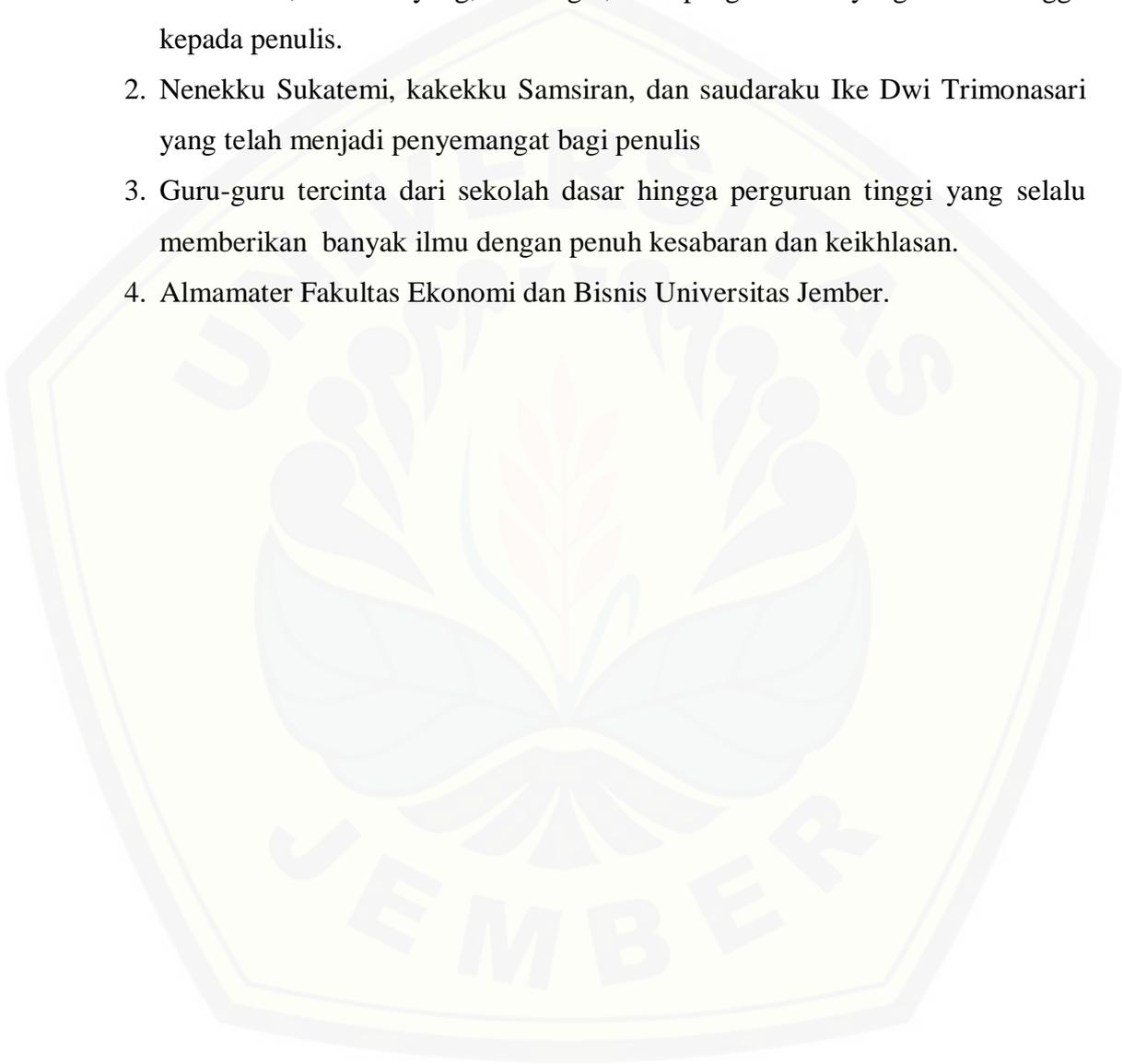
Oleh:
Ika Rahmawati
NIM 150810101103

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur kehadirat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sukati dan Ayahanda Eko Winarto tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis.
2. Nenekku Sukatemi, kakekku Samsiran, dan saudaraku Ike Dwi Trimonasari yang telah menjadi penyemangat bagi penulis
3. Guru-guru tercinta dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang selalu memberikan banyak ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya”

(Terjemahan QS. Al Baqarah: 286)

“Man Jadda Wa Jadda”

Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil

(Pepatah Arab)

“Jika seseorang bekerja keras pada sesuatu selama sepuluh ribu jam, saya yakin mereka setidaknya akan memenuhi apa yang ingin mereka capai”

(Kai EXO)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Rahmawati

NIM : 150810101103

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik regional Bruto(PDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

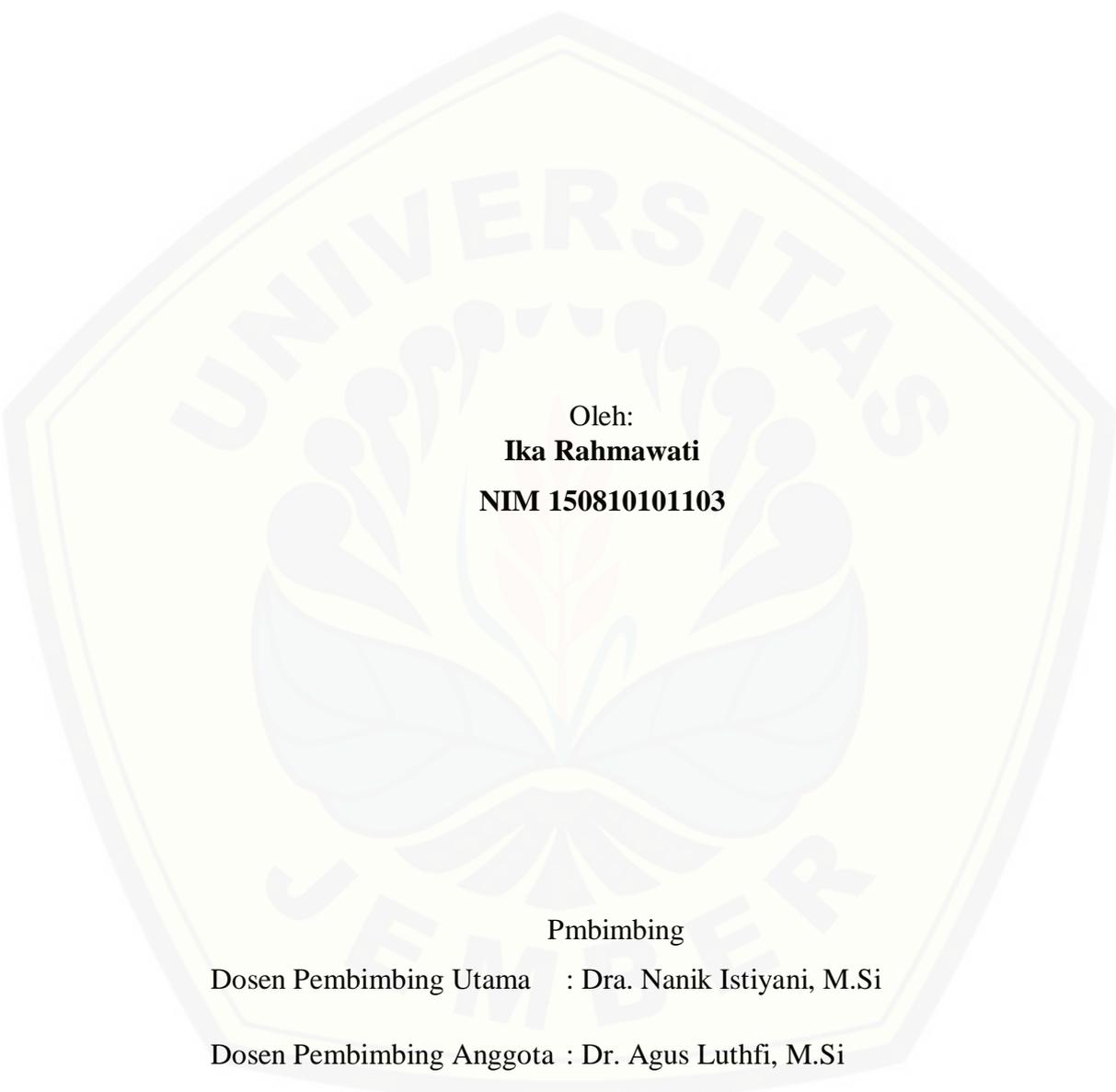
Jember, 22 November 2019

Yang Menyatakan

Ika Rahmawati
NIM 150810101103

SKRIPSI

**PENGARUH UPAH MINIMUM, PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO, DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA
KERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR**



Oleh:
Ika Rahmawati
NIM 150810101103

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Nanik Istiyani, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Agus Luthfi, M.Si

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur

Nama Mahasiswa : Ika Rahmawati

NIM : 150810101103

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan : 12 November 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Nanik Istiyani, M.Si

NIP. 196101221987022002

Dr. Agus Luthfi M.Si.

NIP. 196505221990021001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Dr. Herman Cahyo Diartho D.S.E., M.P.

NIP. 197207131999031001

PENGESAHAN

**PENGARUH UPAH MINIMUM, PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB), DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ika Rahmawati

NIM : 150810101103

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

19 Desember 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Prof. Dr.Mohammad Saleh (.....)
NIP.195608311984031002
2. Sekretaris : Dr. Herman Cahyo Diartha, S.E., M.P. (.....)
NIP. 197207131999031001
3. Anggota : Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E., M.P. (.....)
NIP. 19780414200122003

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Foto 4 X 6
warna

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA
NIP. 19710727 199512 1 001

PENGARUH UPAH MINIMUM, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Ika Rahmawati

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember*

ABSTRAK

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan tidak terlepas dari masalah-masalah yang ada berkaitan dengan ketenagakerjaan. Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dari perubahan aspek dalam perekonomian seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, perkembangan kemahiran tenaga kerja dan kenaikan taraf dalam kemakmuran masyarakat. Pendekatan pertumbuhan ekonomi banyak dilakukan di beberapa daerah dalam pengembangan sektor ekonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Jenis penelitian adalah *explanatory reseach* yang bertujuan mengetahui hubungan antar variabel dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan Fixed Effect dan dikaitkan dengan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, Produk domestik regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, dan Investasi PMDN berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, UMP, PDRB, dan Investasi PMDN

THE EFFECT OF MINIMUM WAGES, REGIONAL BRUTO DOMESTIC PRODUCTS (PDRB), AND INVESTMENT ON EMPLOYMENT ABSORPTION IN EAST JAVA PROVINCE

Ika Rahmawati

*Development Economics Department, Faculty of Economics and bussines
University of Jember*

ABSTRACT

Indonesia as a developing country is inseparable from the problems related to employment. Economic development is economic growth that can be measured by changes in aspects of the economy such as the development of education, technological development, development of labor skills and rising levels of prosperity in society. The approach to economic growth is mostly carried out in several regions in the development of regional economic sectors which are expected to increase employment. This type of research is explanatory research that aims to determine the relationship between variables where the variables used in this study are the Minimum Wage, Gross Regional Domestic Product (PDRB), and Investment on employment in the Province of East Java. The method used in this study is panel data with a Fixed Effect approach and is associated with descriptive analysis. Based on the results of the study indicate that the minimum wage variable has a significant positive effect on employment in East Java Province, Gross Regional Domestic Product (GRDP) has a significant positive effect on employment in East Java Province, and PMDN Investment has no significant negative effect on employment in the province of East Java.

Keywords: *Labor Absorption, UMP, GRDP, and PMDN Investment*

RINGKASAN

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan pada aspek lain dalam proses perekonomian seperti perkembangan pendidikan, kemahiran tenaga kerja, perbaikan teknologi, dan kenaikan dalam taraf kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah didasarkan dengan suatu proses interaksi atau hubungan antara berbagai variabel diantaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, modal, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya, dimana manusia merupakan tenaga kerja, pelaku pembangunan, input pembangunan dan konsumen dari hasil pembangunan itu sendiri (Sukirno, 2013).

Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara berkembang dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesempatan kerja. Pendekatan pertumbuhan ekonomi banyak dilakukan di beberapa daerah dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu daerah atau negara. Suatu perekonomian untuk menggerakkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan berkembang, tarif pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat menjadi implikasi dari perkembangan ini, kesempatan kerja akan bertambah, tingkat penyerapan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2006).

Penelitian ini menggunakan penelitian explanatory research yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Tempat dan waktu dilaksanakan di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama periode 2010-2016. Adapun sumber data yang diambil yaitu dari BPS Jawa Timur, buku literature, jurnal, penelitian terdahulu dan searching internet. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel bebas (UMK, PDRB, dan Investasi PMDN) dengan variabel terikat (Penyerapan Tenaga Kerja). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel dengan menggunakan analisis Eviews 9. Data panel merupakan data gabungan dari data cross section dan time series. Penelitian ini menggunakan metode *Fixed Effect Model*. Uji statistik menggunakan koefisien determinasi (R^2), pengujian simultan (Uji F), dan pengujian parsial (Uji t), dan uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) nilai probability sebesar 0,0016 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 dengan nilai koefisien 0,016053 artinya setiap kenaikan 1 Rupiah UMK akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. PDRB memiliki nilai probability sebesar 0,0007 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 dan nilai koefisien sebesar 1.196906 yang artinya setiap kenaikan 1 Milyar PDRB akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Investasi PMDN memiliki nilai probability sebesar 0.6949 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 dan nilai koefisien sebesar -0,000725 yang artinya investasi PMDN tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa upah minimum Kabupaten/Kota dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan investasi PMDN tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur 2011-2017.

PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Keterkaitan Sektor Pertanian Dan Sekttor Industri Pengolahan Dalam Perekonomian Provinsi Jawa Timur (Pendekatan Input-Output)”. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan sripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dra. Nanik Istiyani, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Agus Lutfhi. M.Si selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Fivien Muslihatinningsih, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terimakasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Dr. Riniati, M.P selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
6. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa.

7. Ibunda Sukati dan Ayahanda Eko Winarto yang telah membimbing dari kecil hingga dewasa, terimakasih banyak atas segala kasih sayang, dukungan dan doa pastinya yang selalu Beliau panjatkan teruntuk anak-anaknya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.
8. Nenek Sukatemi dan kakek Samsiran telah memberikan semangat dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik
9. Saudaraku Ika Dwi Trimonasari terimakasih sudah menjadi pengingat dan penghibur disaat penulis mulai lelah akan segala tugas yang akan diselesaikan.
10. Keluarga dan Teman-teman KKN 68 Desa Petung, Kecamatan Curahdami-Bondowoso. Terima kasih untuk 45 harinya yang sangat berkesan.
11. Terimakasih kepada teman-teman tercinta yang telah mengisi hari-hari dan memberikan motivasi dan dorongan akan kelulusan penulis Gunawan, Rizza, Vinda, Risky, Ica, Reza Imadian, Reza Nugraha, Riyad, Alfin, Fauzi, Kiki, Ayu, Putri, Mega, Ella.
13. Teman – Teman Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan angkatan 2015 terima kasih yang telah memberikan dukungan dan doanya.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 25 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN SAMBUTAN | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| PERSEMBAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERNYATAAN | v |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... | vii |
| PENGESAHAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| RINGKASAN | xi |
| PRAKATA | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xviii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xx |
| BAB.1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 6 |
| 2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi..... | 6 |
| 2.1.2 Tenaga kerja..... | 7 |
| 2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja..... | 10 |
| 2.1.4 Upah Minimum | 11 |
| 2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... | 14 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1.6 Investasi..... | 18 |
| 2.1.7 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja..... | 21 |
| 2.1.8 Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja..... | 22 |
| 2.1.9 Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja..... | 22 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 23 |
| 2.3 Kerangka Konseptual..... | 26 |
| 2.4 Hipotesis Penelitian..... | 27 |
| BAB 3. METODE PENELITIAN | 28 |
| 3.1 Rancangan Penelitian | 28 |
| 3.1.1 Jenis Penelitian..... | 28 |
| 3.1.2 Unit Analisis | 28 |
| 3.1.3 Jenis dan Sumber Data | 28 |
| 3.1.4 Populasi dan Sampel..... | 28 |
| 3.2 Metode Analisis Data | 29 |
| 3.2.1 Analisis Regresi Data Panel..... | 29 |
| 3.3 Tahapan Analisis Input Output | 31 |
| 3.3.1 Uji Chow..... | 31 |
| 3.3.2 Uji Hausman | 32 |
| 3.4 Pengujian Asumsi Klasik | 33 |
| 3.4.1 Uji Normalitas | 33 |
| 3.4.2 Uji Multikolinieritas | 34 |
| 3.3.2 Uji Heteroskedisitas | 34 |
| 3.5 Pengujian Hipotesis..... | 34 |
| 3.6 Definisi Operasional..... | 37 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 39 |
| 4.1 Gambaran Umum | 39 |
| 4.1.1 Keadaan Geografis Provinsi Jawa Timur | 39 |
| 4.1.2 Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur..... | 40 |

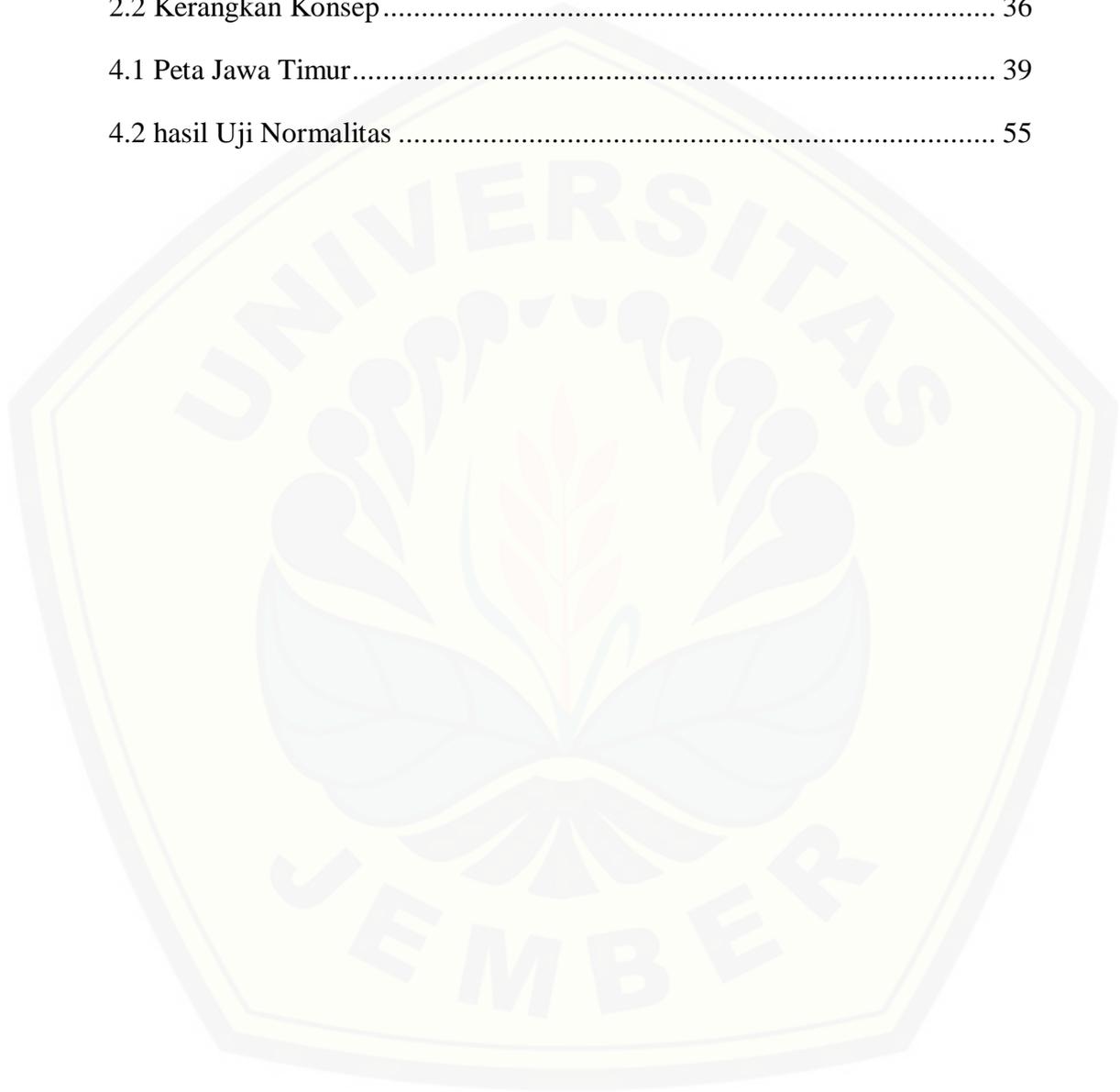
| | |
|--|-----------|
| 4.2 Deskripsi Variabel Penelitian | 41 |
| 4.2.1 Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi | 41 |
| 4.2.2 Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur | 43 |
| 4.2.3 Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur | 45 |
| 4.2.3 Investasi PMDN di Jawa Timur | 47 |
| 4.3 Hasil Regresi Panel | 49 |
| 4.3.1 Estimasi Model Regresi Panel | 50 |
| 4.4 Hasil Uji Statistik | 51 |
| 4.4.1 Uji Simultan (Uji F) | 51 |
| 4.4.2 Uji Parsial (Ui t) | 52 |
| 4.4.3 Koefisien Determinasi (Uji R) | 53 |
| 4.5 Uji Asumsi Klasik | 53 |
| 4.5.1 Uji Multikolinieritas | 54 |
| 4.5.2 Uji Heteroskedasitas | 54 |
| 4.5.3 Uji Normalitas | 55 |
| 4.6 Pembahasan | 56 |
| 4.6.1 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja | 56 |
| 4.6.2 Pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja | 58 |
| 4.6.3 Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja | 60 |
| BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 61 |
| 5.1 Kesimpulan | 61 |
| 5.2 Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 63 |
| Lampiran | 64 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja dan Bekerja di Jawa Timur 2011-2017..... | 3 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 27 |
| Tabel 4.1 Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur..... | 39 |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten/Kota Jawa Timur 2011-2017 | 42 |
| Tabel 4.3 Upah Minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur..... | 44 |
| Tabel 4.4 PDRB di Provinsi Jawa Timur 2011-2017..... | 46 |
| Tabel 4.5 Investasi PMDN di Provinsi Jawa Timur 2011-2017..... | 48 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji Chow Test..... | 49 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman Test..... | 50 |
| Tabel 4.8 Estimasi Model Regresi Panel dengan Fixed Effect Model..... | 50 |
| Tabel 4.9 Hasil Uji F Effects Specification Cross Section Fixed..... | 51 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji t..... | 52 |
| Tabel 4.11 Hasil Uji R ² | 53 |
| Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolineritas..... | 54 |
| Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas..... | 54 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| 1.1 Grafik UMK, PDRB, dan Investasi PMDN Jawa Timur 2011-2017 | 4 |
| 2.1 Penentuan Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja | 13 |
| 2.2 Kerangka Konsep | 36 |
| 4.1 Peta Jawa Timur | 39 |
| 4.2 hasil Uji Normalitas | 55 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| A.1 Data Jumlah Penduduk yang bekerja di Jawa Timur 2011-2017 | 65 |
| A.2 Data Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2011-2017..... | 66 |
| A.3 Data PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2011-2017 | 67 |
| A.4 Data Investasi PMDN Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2011-2017..... | 68 |
| B.1 Hasil Analisis Regresi Data Panel..... | 69 |
| C.1 Hasil Chow(Chow Test) | 70 |
| C.2 Hasil Uji Hausman (Hausman Test)..... | 70 |
| D.1 Hasil Multikolinieritas..... | 71 |
| D.2 Hasil Uji Normalitas..... | 71 |
| D.3 Hasil Heterokedasitas | 71 |



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan tidak saja menyangkut dimensi ekonomi tetapi juga menyangkut masalah dimensi sosial. Tenaga kerja menjadi salah satu aspek ekonomi yang membutuhkan pengawasan, pengendalian dan kebijakan untuk mengelola. Tanpa adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah maka akan menimbulkan masalah serius mengenai tenaga kerja. Masalah tenaga kerja adalah masalah yang kompleks dan besar, karena dapat mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu dapat dipahami. Masalah tersebut dikatakan sebagai masalah yang besar karena berkaitan dengan jutaan jiwa (Simanjutak, 2001).

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari perubahan aspek lain dalam perekonomian seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, perkembangan kemahiran tenaga kerja, dan kenaikan taraf dalam kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah pada dasarnya merupakan suatu proses dimana hubungan antara berbagai variabel di antaranya sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, modal dan lain-lain. Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam pembangunan adalah melaksanakan pembangunan itu sendiri dengan para pekerja khususnya dengan tenaga kerja penduduk Indonesia mencapai sebesar 264 jiwa pada tahun 2017. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya, dimana manusia merupakan tenaga kerja, pelaku pembangunan dan konsumen dari hasil pembangunan ekonomi itu sendiri (Sukirno, 2013).

Keberhasilan ekonomi pembangunan di negara berkembang dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesempatan kerja. Indonesia juga sebagai negara berpendudukan terbesar ke lima di dunia, dengan jumlah penduduk sebesar 264 juta jiwa pada tahun 2017, serta negara yang

memiliki sumber daya manusia yang besar dan menjadi potensi besar dalam menggerakkan perubahan pembangunan ekonomi. Tujuan dari proses pembangunan adalah meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang-barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara yang bergantung dengan kuantitas penduduk yang dihasilkan oleh tenaga kerja dan sebagian pada nilai atas produk tersebut. Pembangunan ekonomi juga merupakan serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk menggerakkan kegiatan ekonomi sebagai implikasi dari perkembangan mulai kesempatan kerja akan bertambah, tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi dalam perekonomian negara (Sukirno,2006).

Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia salah satunya adalah pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 38.847.561 juta jiwa, jumlah meningkat 6,4 juta jiwa dibandingkan pada tahun 2015. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2017 mencapai 39.292.972 juta jiwa. Peningkatan angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja di pasar kerja menambah, namun penawaran tenaga kerja yang berkerja mampu menyerap angkatan kerja tersebut, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pengangguran. Hal ini karena jumlah pengangguran di Jawa Timur tahun 2011-2017 memberi sumbangsih sebesar 4,21 persen dari total keseluruhan pengangguran di Pulau Jawa. Seperti terlihat di tabel 1.1 yang menunjukkan jumlah pengangguran di Jawa Timur mencapai 838.496 jiwa dan merupakan jumlah yang besar dengan total angkatan kerja sebesar 20.937.716 jiwa pada tahun 2017. Hal ini berarti penyerapan tenaga kerja masih kurang karena tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi untuk Jawa Timur, pertumbuhan yang terjadi pada jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja ternyata tidak diimbangi oleh tingginya penyerapan

tenaga kerja yang ada. Akibat dari kurangnya penyerapan tenaga kerja yang tersedia akan menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi.

Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja dan Bekerja di Jawa Timur 2011-2017 (Jiwa)

| Tahun | Jumlah Penduduk | Bukan Angkatan Kerja | Bekerja | Pengangguran | Angkatan Kerja |
|-------|-----------------|----------------------|------------|--------------|----------------|
| 2011 | 37.840.657 | 8.168.622 | 18.463.606 | 1.050.333 | 19.652.562 |
| 2012 | 38.106.590 | 8.809.666 | 19.338.902 | 828.615 | 20.238.054 |
| 2013 | 38.363.195 | 8.850.476 | 19.553.910 | 878.543 | 20.432.453 |
| 2014 | 38.610.202 | 9.428.684 | 19.306.508 | 843.490 | 20.149.998 |
| 2015 | 38.847.561 | 9.610.164 | 19.367.777 | 906.904 | 20.274.681 |
| 2016 | 39.075.200 | 10.214.776 | 20.039.220 | 839.283 | 20.289.000 |
| 2017 | 39.292.972 | 9.505.442 | 20.195.246 | 838.496 | 21.004.695 |

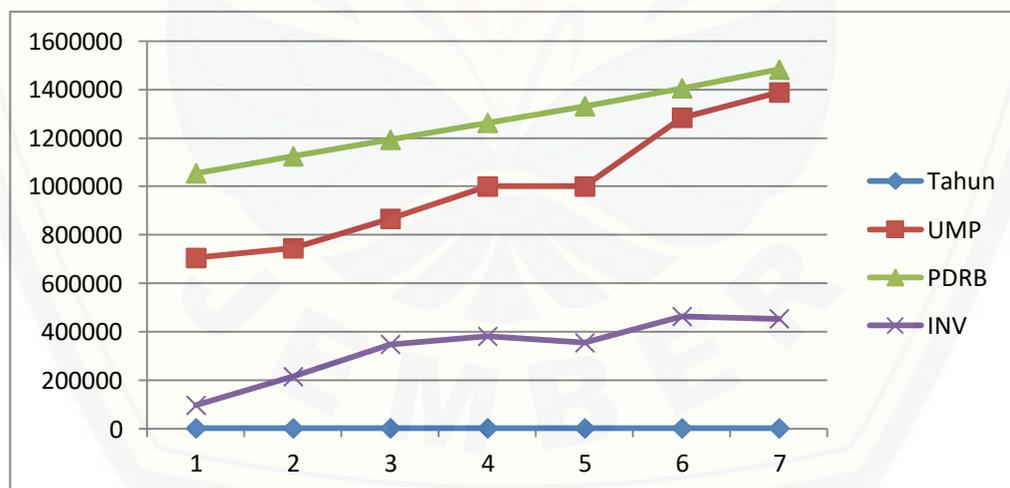
Sumber : BPS Indonesia, 2017

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur untuk terus mengimbangi permintaan tenaga kerja yaitu dengan sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penerapan upah minimum merupakan usaha dalam rangka untuk meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat. Kenaikan upah memang dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja melalui Teori Klasik yang menyatakan bahwa upah yang lebih tinggi mengundang pertumbuhan penduduk yang menyebabkan permintaan akan makanan naik sehingga produsen perlu menambah produksinya yaitu dengan menambah jumlah tenaga kerja sebagai pengelola produksi yang dapat dihasilkan (M.L. Jhingan, 2016).

Selain upah pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator pembangunan suatu negara atau daerah. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah harus membandingkan pendapatan riil daerah yang bersangkutan dari tahun ke tahun, indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Produk (PDRB). PDRB memiliki pengaruh terhadap jumlah angkata kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai akan bertambah barang dan jasa dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat pula. Menurut Teori Lewis, semua sektor ekonomi harus tumbuh serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan pertanian,

salah satu caranya adalah dengan mengalihkan kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor industri, dalam keadaan demikian, maka peranan pertumbuhan ekonomi mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja bersumber dari adanya ekspansi pada kegiatan sektor berlingkup modern (M.L. Jhingan, 2016).

Pada tahun 2017 tingkat angkatan kerja dan bekerja mencapai peningkatan dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor yaitu investasi. Investasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan sumber untuk menaikkan produksi. Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mangangti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk produksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Menurut teori Harrod-Domar, dengan adanya penambahan peralatan-peralatan produksi dapat memperbesar kapasitas produksi sehingga akan berdampak pada penambahan tenaga kerja (M.L. Jhingan, 2016).



Grafik 1.1 UMK, PDRB, dan Investasi PMDN Provinsi Jawa Timur 2011-2017
(Sumber: BPS Jawa Timur, 2016).

Dari latar belakang untuk mengetahui apakah ada pengaruh upah minimum Kabupaten/Kota, PDRB dan investasi PMDN terhadap Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Jawa Timur, maka peneliti membahas mengenai

“ Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Investasi PMDN Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2011-2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur ?
2. Seberapa besar pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur ?
3. Seberapa besar pengaruh Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh jumlah upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberi kontribusi kepada:

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu informasi dan tambahan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai wadah dalam mengasah daya pikir dan instrumen pelatihan penulisan karya ilmiah dengan pemanfaatan ilmu teoritis dan kajian aktualisasi sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan yang lebih luas.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan berbasis ketenagakerjaan tidak dapat secara sederhana menjadi sekedar pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat dilakukan dengan, misalnya memfokuskan pada sektor-sektor padat modal, tanpa harus diikuti dengan penciptaan tenaga kerja yang memadai. Bahkan dalam perspektif pembangunan manusia pertumbuhan ekonomi merupakan sarana utama bagi pembangunan manusia yang dapat berlangsung secara berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan bukti empiris yang menunjukkan bahwa tidak ada negara pun yang dapat membangun manusia secara berkesinambungan tanpa tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang cukup bagi pembangunan manusia yang menjadikan pertumbuhan ekonomi akan dapat ditransformasikan menjadi peningkatan kapasitas manusia jika pertumbuhan ini berdampak secara positif terhadap penciptaan lapangan kerja atau usaha.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu daerah atau suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah atau negara berkembang baik dengan menggerakkan sektor-sektor lainnya sehingga sisi produksi akan memerlukan tenaga kerja produksi. Suatu pandangan umum menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan penyerapan tenaga kerja tetapi juga ada bahwa dengan produktivitas yang tinggi bisa berarti akan sedikit tenaga kerja yang dapat diserap. Berpijak dari teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Solow tentang fungsi produksi agregat menyatakan bahwa output nasional sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi yang disimbolkan Y merupakan fungsi dari modal (kapital= K) fisik, tenaga kerja (L) dan kemajuan teknologi yang dicapai (A) faktor penting yang

mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi (Dornbusch, Fischer, dan Startz, 2004).

Model Solow dapat diperluas sehingga mencakup sumberdaya alam sebagai salah satu inputnya. Dasar pemikiran yaitu output nasional tidak hanya dipengaruhi oleh K dan L saja tetapi juga dipengaruhi oleh lahan pertanian atau sumberdaya alam lainnya seperti cadangan minyak. Suatu negara yang memberikan perhatian lebih kepada pendidikan terhadap masyarakat akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan lebih baik pada yang tidak melakukannya. Dengan kata lain, Investasi terhadap sumber daya manusia melalui kemajuan pendidikan menghasilkan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apabila Investasi tersebut dilaksanakan secara relatif merata maka tingkat penyerapan tenaga kerja akan semakin tinggi dan meningkat.

2.1.2 Tenaga Kerja

Tenaga kerja menurut Badan Pusat Statistika (BPS) merupakan penduduk baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Penduduk yang berada diatas usia kerja diatas usia 15 tahun atau lebih. Tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Angkatan kerja juga terdiri dari golongan berkerja serta golongan menganggur dan mencari pekerjaan.

Tenaga kerja merupakan modal dari bergeraknya roda pembangunan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dengan berlangsungnya demografi. Tenaga kerja merupakan penduduk yang bekerja dengan batas umur minimal 15 tahun sampai 64 tahun. Pembangunan ketenagakerjaan mencakup banyak dimensi dan saling keterkaitan antar tenaga kerja dengan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja adalah penduduk

yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lainnya seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga dengan batasan umur 15 tahun (Payaman Simanjutak, 2001).

Permasalahan pokok yang dialami dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan adalah pertasi full employment dan perbaikan struktur hidup masyarakat. Sementara kebijakan makro ekonomi menentukan jumlah permintaan tenaga kerja dan dapat menambah efektifnya penggunaan kebijakan fiskal. Program-program ketenagakerjaan jika digunakan bersamaan dengan kebijakan fiskal dan moneter dapat mengurangi masalah struktur yang bercirikan adanya pengangguran yang tinggi (Barthos, 2004).

Menurut pandangan Mazhab klasik, perekonomian pada umumnya akan selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh, menurut para ahli ekonomi klasik pengangguran tenaga kerja merupakan keadaan yang berlaku secara sementara saja. Pandangan ini didasarkan kepada dua keyakinan yang dapat dari keseimbangan antara penawaran dan permintaan agregat sehingga penggunaan tenaga kerja penuh yang disebabkan dari fleksibilitas suku bunga dan tingkat harga (Sukirno, 2004).

Permintaan tenaga kerja didasarkan atas asumsi bahwa permintaan tenaga kerja diturunkan dari permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk dipekerjakan di suatu jenis perusahaan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Permintaan tenaga kerja adalah fungsi dari upah rill dan tingkat modal. Karena tingkat modal diasumsikan konstan, maka perubahan permintaan tenaga kerja tidak pernah dihasilkan dari perubahan tingkat modal. Variasi permintaan tenaga kerja akan dihasilkan dari perubahan upah rill. Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh dalam ahli ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Adapun beberapa permintaan tenaga kerja dipengaruhi sebagai berikut:

a. Perubahan tingkat upah

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut: Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi mengkonsumsi atau bahkan tidak membeli sama sekali. Akibatnya banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*. Pengusaha lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan tenaga kerja dengan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Kondisi seperti ini terjadi apabila upah naik dengan asumsi harga barang-barang modal lainnya tetap. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja. Baik efek skala produksi maupun efek substitusi akan menghasilkan suatu bentuk kurva permintaan tenaga kerja yang mempunyai *slope negatif*.

b. Perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen.

Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkatkan, perusahaan akan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya, untuk maksud agar perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

c. Harga barang modal turun

Apabila harga barang modal turun maka biaya produksi turunan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini perusahaan cenderung meningkatkan produktivitasnya karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat juga.

Adapun perubahan tingkat upah yang akan dipengaruhi dengan tingkat tinggi rendahnya biaya produksi suatu perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal hal seperti berikut :

- 1) Naiknya tingkat upah yang akan meningkatkan biaya produksi suatu perusahaan yang selanjutnya akan meningkatnya pula harga per unit barang yang akan di produksi perusahaan.
- 2) Apabila upah naik maka akan berasumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah , maka suatu pengusaha ada yang lebih suka dengan menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan dari tenaga kerja yang kebutuhan akan baran-barang modal seperti mesin, dan alat lain-lain.

2.1.3 Penyerapan Tenaga kerja

Menurut Todaro (2003) Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya demografi. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi dalam sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari struktur perekonomian untuk suatu wilayah. Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha, terjadinya penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Handoko, 1985).

Perluasan kesempatan kerja merupakan usaha untuk mengembangkan sektor-sektor penampungannya kesempatan kerja dengan produktivitas yang rendah. Usaha perluasan kesempatan kerja tidak terlepas dari faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan faktor lainnya. Penduduk yang terserap dan tersebar diberbagai sektor perekonomian. Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan

laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal, Pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor. Kedua, secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya dalam pendapatan nasional (Simanjutak, 2001).

2.1.4 Upah Minimum

Salah satu faktor produksi yang dipengaruhi dalam kegiatan produksi adalah tenaga kerja. Tenaga kerja dapat membantu dalam proses produksi sehingga menghasilkan output yang diinginkan perusahaan. Adanya pengorbanan yang dikeluarkan tenaga kerja untuk perusahaan maka tenaga kerja berhak atas balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja tersebut berupa upah. Adapun membuat perbedaan antara dua pengertian upah :

- a. Upah nominal (upah uang) adalah sejumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga kerja mental dan fisik pekerja yang digunakan dalam proses produksi.
- b. Upah rill adalah tingkat upah yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para pekerja.

Sementara ada yang menyatakan upah merupakan imbalan yang diterima seseorang atas jasa kerja yang diberikannya bagi pihak lain, diberikan seluruhnya dalam bentuk uang atau sebagian dalam bentuk uang dan sebagian dalam bentuk natura (Simanjutak, 2001). Upah minimum di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum. Definisi upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Dasar kebijakan upah minimum diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang penetapan upah minimum didasarkan pada KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah Minimum cenderung meningkat setiap tahunnya seiring dengan naiknya upah nominal kesejahteraan (upah rill).

Upah minimum memiliki efek buruk terhadap pasar tenaga kerja dan tingkat pengangguran, ketika undang-undang upah minimum diberlakukan, pengangguran akan meningkat. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena upah menjadi mahal daripada apa yang telah mereka anggarkan sebelumnya (C.Campbell dan R. Campbell dalam Nadianaputri, 2015). Undang-Undang upah minimum juga mengurangi ketersediaan lapangan kerja dan hal ini menjadi kontradiksi dari tujuan undang-undang upah minimum (Swope,2015).

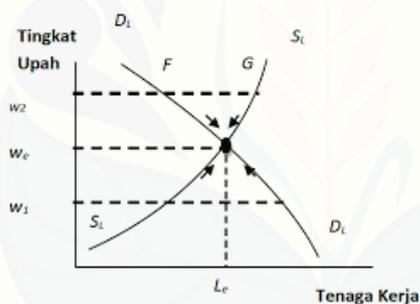
Upah minimum adalah sebuah kontroversi bagi yang mendukung kebijakan tersebut dengan mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat meingkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional. Teori Klasik menyatakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor-faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marjinal dari faktor produksi tersebut, dengan kata lain tenaga kerja memperoleh upah senilai dengan pertumbuhan hasil marjinalnya.

Kebijakan dalam pemberlakuan dan peningkatan upah riil berpengaruh negatif sebab dapat menyebabkan terjadinya pengangguran dalam masyarakat. Adanya tuntutan kenaikan UMK pada tiap kota setiap tahunnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kaum buruh, disisi lain (pengusaha) justru berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran. Hal tersebut dikarenakan jika UMK meningkat maka biaya produksi yang dikeluarkan cukup tinggi, sehingga terjadi inefisiensi pada perusahaan dan akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi dan hal ini akan berakibat berkurang-nya tenaga kerja (Kumiawan dan Herniwati 2013).

Menurut teori Mankiw, upah senantiasa menyesuaikan diri demi terciptanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja,

Tingkat upah dan kuantitasnya pasar tenaga kerja telah menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Dalam teori ini bahwasanya menjelaskan bahwa semakin tinggi upah maka akan mengurangi tenaga kerja yang diminta oleh suatu perusahaan karena besarnya suatu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang yaitu dengan adanya biaya bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya untuk bertahan hidup bagi pegawai/buruh yang bersangkutan.

Besar kecilnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat. Tingkat upah alami naik proporsional dengan tingkat standar standar hidup masyarakat. Sama halnya dengan harga-harga lainnya, harga tenaga kerja (upah) ditentukan oleh permintaan dan penawaran maka dalam kondisi ekuilibrium, secara teoritis para pekerja akan menerima upah yang sama besarnya dengan nilai kontribusi mereka dalam produksi barang dan jasa.



Gambar 2.1 Penentuan Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja : Pendekatan Pasar Bebas (Sumber : Mankiw, 2007)

Gambar 1, titik w_e melambangkan tingkat upah ekuilibrium (equilibrium wage rate), pada tingkat upah yang lebih tinggi seperti pada w_2 , penawaran tenaga kerja melebihi permintaan sehingga persaingan di antara individu dalam rangka memperebutkan pekerjaan akan mendorong turunnya tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibriumnya, yakni w_e . Sebaliknya pada upah yang lebih rendah seperti w_1 , jumlah total tenaga kerja yang akan diminta oleh produsen akan melebihi kuantitas penawaran yang ada sehingga terjadi persaingan diantara para pengusaha dalam memperebutkan tenaga kerja dan mendorong kenaikan tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibrium w_e .

Kelemahan dari model Pasar Bebas Kompetitif Tradisional adalah kurang memberikan petunjuk yang berarti mengenai kenyataan determinasi upah dan lapangan kerja khususnya di negara berkembang. Mekanisme penyesuaian otomatis dalam pasar tidak akan mampu mendorong tingkat upah riil sampai pada tingkat w_e yang merupakan tingkat upah ekuilibrium.

Tingkat upah dalam bentuk sejumlah uang dalam kenyataannya tidak pernah fleksibel dan cenderung terus-menerus turun karena lebih sering dan lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai macam kekuatan institusional seperti tekanan serikat dagang atau serikat buruh. Kemerosotan ekonomi selama dekade 1980-an yang melanda negara – negara Afrika-Amerika Latin mengakibatkan merosotnya upah dan gaji riil di segenap instansi pemerintah, namun ternyata masih banyak calon pekerja yang memburu posisi kerja di sektor formal meskipun mereka tahu gajinya semakin lama semakin tidak memadai untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari.

Undang-undang No, 13 Tahun 2003 menetapkan tingkat upah minimum yang harus dibayar tingkat upah minimum ditengarai akan lebih banyak berdampak pada pengangguran dengan usia muda. Pada intinya indeksasi upah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan hidup dengan kata lain upah ini telah disesuaikan dengan inflasi. Ketika terjadi inflasi pekerja akan menuntut kenaikan upah yang memaksa perusahaan untuk meningkatkan upah, karena adanya biaya yang harus ditanggung dari tindakan pekerja jika tuntutan kenaikan upah tidak dikabulkan perusahaan.

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau provinsi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik regional Bruto (PDRB). PDRB adalah nilai dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah, dalam kurun waktu tertentu biasanya tiap tahun (Soebagiyo, 2007).

Pengertian Produk Domestik Regional bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu

wilayah, menerapkan seluruh jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB dapat di definisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa untuk unit ekonomi di suatu wilayah.

Hukum Okun (Okun's Law) menjelaskan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja, bahwa jika terjadi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terjadi disuatu daerah maka penyerapan tenaga kerja disuatu daerah tersebut juga akan meningkat. Hukum Okun (Okun's law) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1% dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2%. Dengan kata lain, PDRB yang pada akhirnya mempengaruhi GDP berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di wilayah tersebut. Selain itu kondisi perekonomian secara menyeluruh di setiap daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar jumlah belanja daerah pada daerah yang bersangkutan. Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan empat pendekatan yaitu :

a. Metode Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Unit – unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha.

b. Metode Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang telah diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan: semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

c. Metode Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swata nirlaba, pengeluaran konsumsipemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor). Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang dihasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor – faktor produksi, PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena dalam nya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan output nasional suatu periode tertentu terhadap periode sebelumnya dalam perkembangannya terdapat banyak teori mengenai pertumbuhan ekonomi. Macam-macam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu :

- 1) Produk Domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan (PDRB rill) jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun tertentu.

Adapun Metode perhitungan Produk Domestik regional Bruto (PDRB). Adapun berbagai macam cara yang digunakan untuk menghitung PDRB dengan cara tersebut antara lain:

- a) Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar berlaku dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung digunakan ada tiga macam pendekatan perhitungan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung digunakan apabila data yang diperlukan untuk menghitung PDRB atas dasar harga konstan.

- b) Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB secara riil bukan karena adanya pengaruh harga. Ada empat cara yang dikenal untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan yaitu : Revaluasi, Ekstrapolasi, Deflasi, Deflasi berganda (Paramitha G.W.N, 2009).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik merupakan aliran Klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad-19 an, yaitu di masa revolusi industri, dimana suasana waktu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik dikembangkan oleh penganut aliran klasik yaitu Adam Smith. Orang yang pertama membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Adam Smith (1723-1790). Dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (1776) ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Menurut Adam Smith terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk unsur pokok dari sistem suatu negara menurut Smith ada tiga yaitu: Sumber daya alam yang tersedia (atau faktor produksi tanah), Sumber daya insani (atau jumlah penduduk), Stok barang modal yang ada.

Menurut Adam Smith untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dapat mendorong ditemukan alat-alat atau mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi. Pertumbuhan ini mulai maka akan sifat kumulatif yang artinya bila ada pasar yang cukup dan ada akumulasi kapital, pembagian kerja yang terjadi dan ini akan menaikkan penghasilan tingkat produktivitas tenaga kerja kenaikan produktivitas ini akan menaikkan penghasilan nasional dan selanjutnya memperbesar jumlah penduduk.

Tenaga kerja tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, meningkatnya tenaga kerja memberikan peningkatan terhadap produktivitas tenaga kerja yang merupakan sumber daya utama dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu masalah

yang di hadapi secara umum dalam ketenagakerjaan adalah keimbangan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja dalam pasar.

Ahli ekonomi yakni bahwa kualitas tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika suatu negara memiliki teknologi canggih namun jika tenaga kerja tidak dapat menggunakan teknologi tersebut hal ini tetap tidak akan membawa perubahan dalam pertumbuhan ekonomi. Hubungan PDRB dengan penyerapan tenaga kerja yaitu dengan bertumbuhnya suatu ekonomi dalam peningkatan jangka panjang akan terjadi kepada standar hidup suatu masyarakat yang bergantung dengan pertumbuhan pendapatan nasional dan berkaitan dengan pertumbuhan penduduk.

2.1.6 Investasi

Secara umum investasi meliputi penambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti penambahan mesin baru, pembuatan jalan, pembukaan tanah , dan sebagainya. Investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan mengganti atau menambahkan barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan, dengan kata lain investasi adalah kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian (Sukirno, 2000).

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta atau kerja sama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003). Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Secara teori peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Harrod-Domar (Mulyadi, 2003) dalam teorinya menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas

produksi, kapasitas produksi yang membesar tersebut membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar pula, dimana dalam kondisi seperti ini diasumsikan bahwa tenaga kerja meningkat secara geometris dan selalu *full employment*. Investasi berbeda dengan tabungan, tabungan biasanya dilakukan oleh perorangan dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai tujuan penabung, sedangkan investasi dilakukan oleh suatu bisnis atau perusahaan dengan tujuan yang ditentukan oleh bisnis itu sendiri (Rosyidi, 1998).

Investasi dapat diketahui merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor atau pengusaha guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Adapun Jenis – jenis Investasi dari pelaku investasi terbagi menjadi dua yaitu :

a. Autonomous Investment (Investasi Otonom)

Investasi otonom adalah investasi besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, artinya tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan. Investasi ini dilakukan oleh pemerintah, karena di samping dengan biayanya sangat besar, investasi ini juga tidak memberikan keuntungan maka swasta tidak dapat melakukan jenis investasin ini karena tidak memberikan keuntungan secara langsung.

b. Induced Investment (Investasi Dorongan)

Investasi dorongan adalah investasi yang besar kecilnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, baik itu pendapatan daerah ataupun pendapatan pusat atau nasional, diadakannya investasi ini akibat adanya pertambahan permintaan, di mana pertambahan permintaan tersebut sebagai akibat dari pertambahan pendapatan. Faktor- faktor yang mempengaruhi Investasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi di antaranya adalah (P.Eko Prasetyo, 2009).

1) Tingkat bunga

Jika tingkat bunga rendah , maka tingkat investasi yang terjadi akan tinggi karena kredit dari bank menguntungkan untuk mengadakan investasi. Sebaliknya jika tingkat bunga tinggi maka tingkat investasi akan rendah,

karena tingkat kredit dari bank tidak dapat memberikan keuntungan dalam proyek investasi.

2) Marginal Efficiency of Capital (MEC)

Jika keuntungan yang diharapkan dari MEC lebih kecil dari tingkat suku bunga riil yang berlaku maka investasi tidak akan terjadi. Jika MEC yang diharapkan lebih tinggi dari tingkat suku bunga riil maka tingkat investasi akan dilakukan. Jika MEC sama dengan tingkat suku bunga maka pertimbangan untuk mengadakan investasi dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya.

3) Peningkatan Aktivitas Perekonomian

Jika ada perkiraan peningkatan aktivitas dalam perekonomian di masa yang akan datang walaupun tingkat bunga lebih besar daripada MEC, maka investasi mungkin akan tetap dilakukan oleh para investor yang mempunyai insting tajam. Karena investor menganggap bahwa investasi di masa yang akan datang lebih memperoleh banyak keuntungan. Sekalipun faktor insting bukan faktor utama, tetapi penting untuk dipertimbangkan oleh para investor dalam mengambil keputusan.

4) Kestabilan Politik Suatu Negara

Semakin stabil kondisi politik di suatu negara semakin baik iklim investasi di suatu negara tersebut, sehingga investasi baik dalam bentuk PMA atau PMDN di negara tersebut akan meningkat. Karena dengan suhu politik yang stabil, berarti country risk juga rendah yang artinya keuntungan investasi akan semakin baik.

5) Tingkat Keuntungan Investasi yang akan diperoleh

Semakin tinggi tingkat keuntungan dalam investasi suatu barang tertentu akan makin besar tingkat investasi tersebut. Namun, secara umum semakin tinggi tingkat keuntungan dari investasi maka semakin tinggi risikonya.

6) Faktor – faktor lain

Selain kelima faktor investasi juga cukup dipengaruhi oleh faktor – faktor seperti : tingkat kemajuan teknologi, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa yang akan datang dan tingkat pendapatan nasional dan perubahan–

perubahannya.

Fasilitas modal yang pada umumnya disebut dengan penanaman modal atau investasi dapat berasal dari 2 sumber, diantaranya menurut (Salvatore, 1997).

a) Investasi Asing (PMA)

Investasi asing atau biasa disebut dengan PMA adalah salah satu bentuk penghimpunan modal guna menunjang proses pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri, Biasanya PMA terdiri atas : Investasi Portofolio dan Investasi asing langsung.

b) Investasi Dalam Negeri (PMDN)

Investasi Dalam Negeri atau biasa disebut dengan PMDN adalah suatu bentuk upaya dalam rangka menambah modal guna menunjang pembangunan nasional maupun wilayah melalui investor dalam negeri. Undang – undang yang mengatur PMDN di Indonesia pertama kali ditetapkan berdasarkan UU No.6 tahun 1968 tentang penanaman Modal Dalam Negeri yang kemudian di sempurnakan oleh UU NO.12 Tahun 1970 juga mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri. Baik PMA maupun PMDN keduanya merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.

2.1.7 Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan tenaga kerja.

Perubahan upah dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Bagi perusahaan upah merupakan biaya produksi sehingga pengusaha akan meminimalkan biaya produksi, yaitu upah untuk mencapai keuntungan yang optimal. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Apabila harga naik, konsumen akan mengurangi konsumsi. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan produsen terpaksa menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan.

Kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja. Karena semakin tinggi tingkat upah yang ditentukan, akan sangat berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Akibatnya perusahaan, perusahaan akan

melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai tindakan efisiensi, upah dipandang sebagai beban oleh pengusaha, karena semakin besar tingkat upah akan semakin kecil tingkat keuntungan yang dinikmati pengusaha. Oleh karena itu kenaikan tingkat upah akan direspon oleh pengusaha dengan menurunkan jumlah tenaga kerja (Tambunsaribu, 2013).

2.1.8 Pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi suatu wilayah akan meningkat, output yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja (Listyaningsih, 2017).

2.1.9 Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan tenaga kerja.

Kegiatan investasi memungkinkan masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Investasi yang dilakukan dalam perusahaan akan mempengaruhi perluasan dari kesempatan kerja. Hal tersebut terjadi dikarenakan dengan adanya investasi maka proses produksi akan lebih meningkat dan untuk melakukan proses produksi memerlukan tenaga manusia, sehingga perusahaan membutuhkan tenaga kerja.

Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan kesempatan kerja menurut Harrod Domar, investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan di tingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja (Dumairy, 1997).

Investasi merupakan variabel yang penting dalam meningkatkannya penyerapan tenaga kerja karena investasi dengan penyerapan tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif sehingga semakin besar investasi yang dilakukan maka akan semakin banyak tenaga kerja yang diminta oleh suatu perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Telah banyak karya-karya penelitian yang membahas tentang penyerapan tenaga kerja dengan sektor yang berbeda-beda dengan variabel yang bermacam-macam pula dalam berupa thesis, jurnal, skripsi antara lain : Danu Anuari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Lampung Tahun 2010-2016 Perspektif ekonomi Islam” dapat ditarik kesimpulan bahwa angkatan kerja di provinsi Lampung dari tahun ketahun mengalami kenaikan dan tenaga kerja yang terserap cenderung fluktuatif yang menyebabkan beban akan pengangguran di provinsi Lampung naik, pada tahun 2016 angkatan kerja di provinsi Lampung naik. Upah minimum yang selalu meningkat setiap tahunnya seharusnya menjadipeluang bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan supply of labor meningkat dan tingkat pendidikan masyarakat akan menentukan seberapa banyak tenaga kerja yang terserap dalam suatu wilayah dan mengurangi pengangguran karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar skill yang dimiliki untuk modal dalam bekerja. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja secara parsial dan simultandi dan secara perspektif ekonomi islam. Secara keseluruhan hasil analisis regresi ini dan di uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara simultan (uji F) upah minimum dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung dikarenakan upah minimum naik maka output yang dikeluarkan juga naik maka perusahaan akan menambah tenaga kerja sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Lampung.

Menurut penelitian terdahulu dari Imam Buchari Universitas Negeri Jakarta “Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015” dapat disimpulkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah upah minimum dan tingkat pendidikan berdampak pada penyerapan tenaga kerja di Industri Manufaktur di Pulau Sumatera tahun 2012-2015 dalam metode ini yang digunakan timeSeries dari tahun 2012-2015 terdiri 10 provinsi di Sumatera dengan metode ex post facto. Data yang disajikan setiap tahun yang diperoleh dari BPS (Biro Pusat Statistik) dan Departemen Tenaga kerja, Penelitian ini menggunakan regresi data panel efek tetap. Berdasarkan hasil Analisis secara simultan, Upah Minimum dan tingkat pendidikan secara signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada Industri Manufaktur di Pulau Sumatera. Berdasarkan analisis upah minimum memiliki koefisien negatif tapi upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dampak secara parsial dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Menurut penelitian terdahulu dari Achmad Naufal Fachreza dari PT. Bank BTPN Syariah Ponorogo “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Kontruksi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015” dapat disimpulkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan upah minimum terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Pengolah data menggunakan pendekatan OLS dengan pengambilan model terbaik yaitu random effect model dengan bantu software eviews 9 dalam pengoperasiannya. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dengan nilai koefisien 0.702167 yang artinya ketika jumlah penduduk mengalami kenaikan 1% maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,70%. Variabel PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dengan koefisien 0,444610 yang artinya ketika PDRB mengalami kenaikan sebesar 1% maka penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan sebesar 0,44 % untuk variabel upah minimum memiliki pengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 0,376859 yang artinya setiap kenaikan upah minimum Rp 1,- maka akan meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebesar 0,37 %.

Penelitian terdahulu menurut Nurafuah Fakultas ekonomi Universitas Negeri Semarang “Analisis 2” bahwa usaha kecil menengah di Jawa Tengah sebagai sektor andalan dalam penyerapan tenaga kerja pada kenyataannya cenderung fluktuatif bahkan laju pertumbuhannya negatif pada beberapa tahun. Peningkatan jumlah unit usaha tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah, demikian juga dengan nilai upah minimum yang cenderung mengalami kenaikan pada setiap tahunnya namun penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah di Jawa Tengah juga mengalami fluktuatif bahkan mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada Usaha kecil dan Menengah (UKM). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan data sekunder. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder. Kesimpulan yang diperoleh dengan pengujian korelasi Jumlah UKM mempunyai hubungan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja, Investasi mempunyai hubungan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja Sedangkan Upah minimum mempunyai hubungan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bagi pengelola UKM sebaiknya memanfaatkan rekan bisnis pelatihan usaha, buku dan internet dalam mencari informasi pasar dan cara manajemen usaha agar usahanya dapat berkembang lebih efektif.

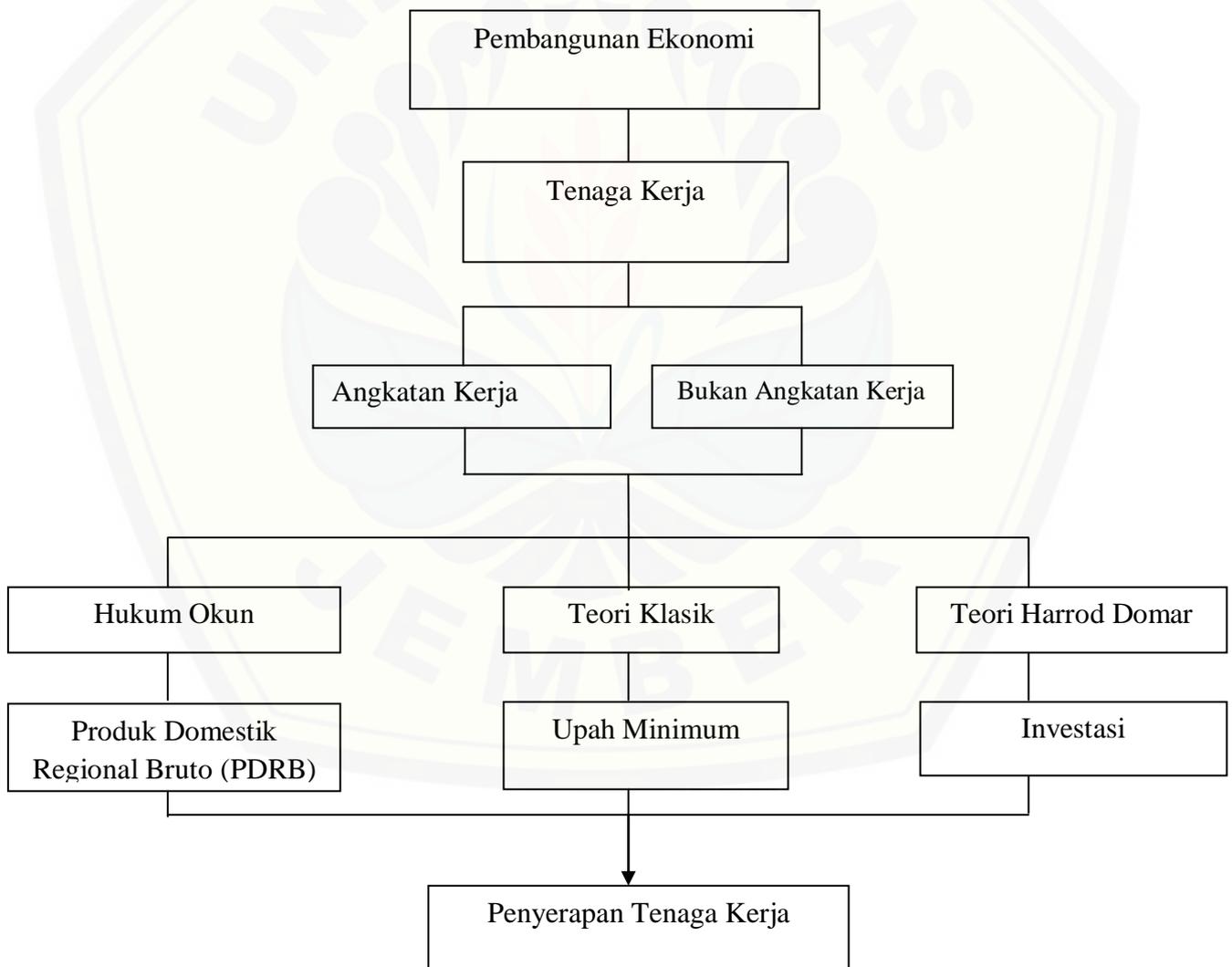
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul | Tujuan Penelitian | Variabel Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Pembahasan |
|----|--|--|--|-------------------------|--|
| 1 | “Pengaruh Upah Minimum dan Pendidikan Terhadap Penyerapan tenaga Kerja Di Provinsi Lampung Tahun 2010-2016” Danu Anuari(2014). | Menganalisis faktor upah minimum dan tingkat pendidikan yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung. | Upah Minimum, Tingkat Pendidikan dan Penyerapan Tenaga Kerja. | Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum dan tingkat pendidikan secara simultan (uji F) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di lampung karena upah minimum naik dan output yang dikeluarkan naik, dan tingkat pendidikan juga berpengaruh. |
| 2 | ” Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015” Imam Buchari(2013). | Mengetahui besarnya tingkat pendidikan dan upah minimum yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri di Pulau Sumatera. | Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Sektor Industri, dan Penyerapan Tenaga Kerja | Regresi Data Panel | Tenaga kerja pada industri Manufaktur di Pulau Sumatera Berdasarkan Analisis Upah minimum memiliki koefisien negatif tapi upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja. Dampak secara parsial dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. |
| 3 | “ Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Kontruksi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015” Achmad Naufal(2015) | Mengetahui besarnya yang mempengaruhi Penyerapan Tenaga kerja pada sektor kontruksi di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. | Jumlah Penduduk, Upah Minimum, PDRB, dan Penyerapan Tenaga Kerja. | OLS | Hasil penelitian Variable jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Variable PDRB juga memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4 | "Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Jawa Tengah" Nurafuah(2012). | Mengetahui besarnya yang mempengaruhi Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah (UKM) di Provinsi Jawa Tengah. | Jumlah Unit, Sektor UKM, Investasi, dan Penyerapan Tenaga Kerja. | Linier Berganda | Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola UKM harus memanfaatkan rekan bisnis pelatihan usaha, buku dan internet dalam mencari informasi pasar dengan cara manajemen usaha. |
| 5 | " Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali" I Gusti Agung Indradewa (2013) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. | Inflasi, PDRB, Upah Minimum, dan Penyerapan Tenaga Kerja. | Analisis regresi deskriptif dan berganda | Penelitian ini menunjukkan Hasil penelitian secara simultan inflasi, PDRB dan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan secara parsial, PDRB dan upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan sementara inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013. |

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menunjukkan alur berfikir secara konseptual yang terfokus pada tujuan dilaksanakan suatu penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Kerangka konseptual dapat diturunkan baik dari teori-teori yang mendasari penelitian kemudian diturunkan kedalam variabel-variabel yang terkait dengan penelitian hingga dapat dirumuskan alur berfikir secara konseptual mengenai penelitian yang dilakukan. Keterkaitan antara variabel bebas seperti Upah Minimum (X1), Produk Domestik Regional Bruto (X2), dan Investasi (X3) terhadap variabel terikat seperti Penyerapan Tenaga Kerja (Y).

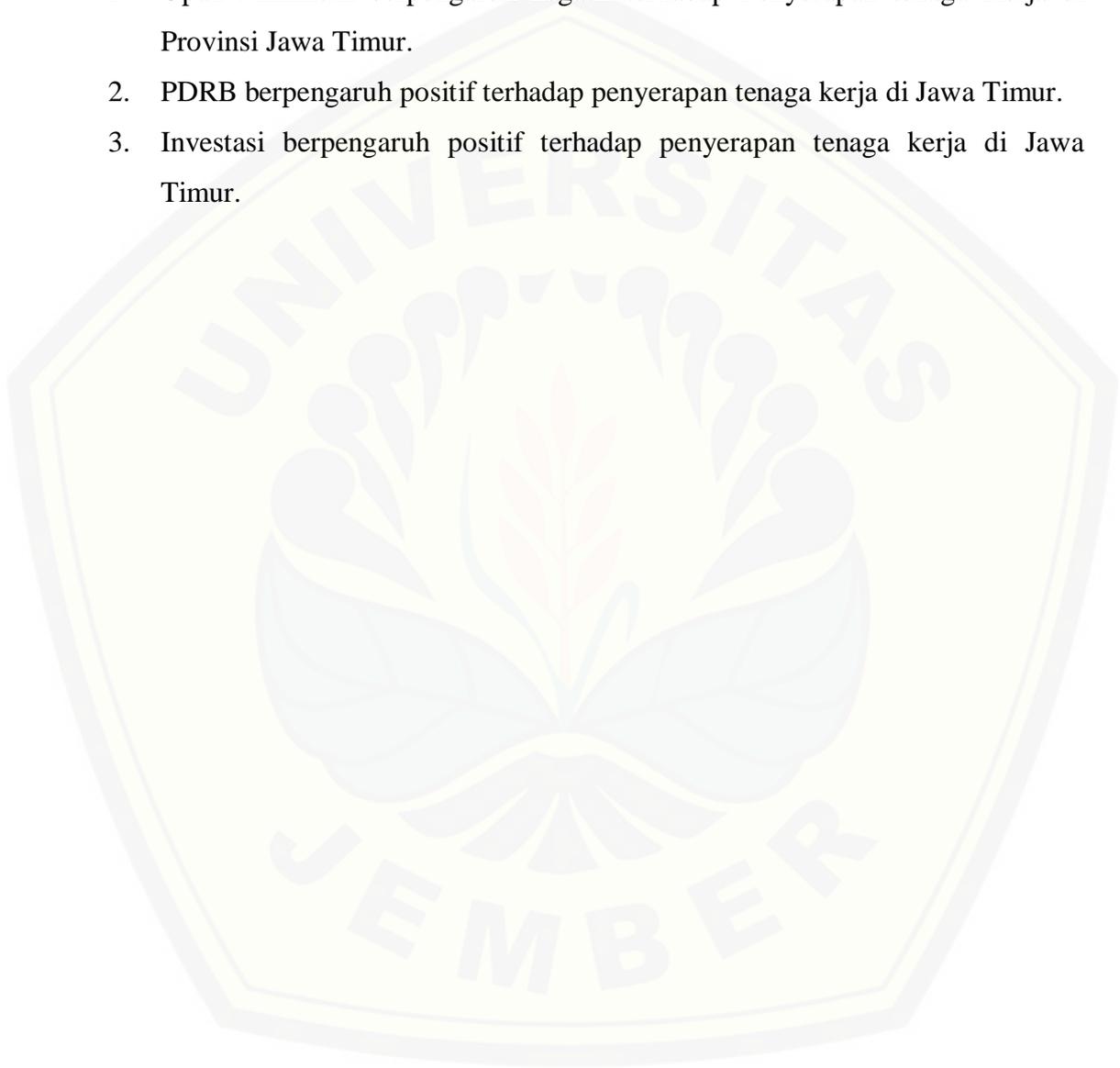


Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian(Sugiyono,2007:93). Berdasarkan Tinjauan Pustaka dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian adalah :

1. Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap Penyerapan tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur.
2. PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.
3. Investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.



BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian explanatory merupakan metode penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jenis penelitian explanatori adalah jenis penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan, pola hubungan, dan besar hubungan antar dua variabel atau lebih, dalam hal ini untuk mengetahui adanya Pengaruh Upah Minimum, PDRB dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Wilayah penelitian di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama waktu 7 tahun dari 2011-2017.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah besarnya variabel Penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan variabel Upah minimum, PDRB, dan Investasi di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya, melainkan dengan data yang diperoleh dengan menata dan menyalin data yang telah dikumpulkan oleh suatu instansi yang telah tersusun dan siap diolah. Sumber data penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistika provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah periode tahun 2011-2017 berupa data runtut waktu (*time series*).

3.1.4 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan gabungan dari seluruh elemen yang terbentuk dalam peristiwa hal atau kejadian yang menjadi pusat perhatian peneliti (Ferdinand, 2006). Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki

Penduduk yang bekerja dengan menggunakan data lima tahun dari tahun 2011 – 2017.

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Analisis Regresi Data Panel

Data panel merupakan data yang memiliki dimensi ruang dan waktu, yang menggabungkan *data time series* dan *cross section*. Dengan kata lain data panel adalah data yang diperoleh dari cross section yang diobservasi berulang 32 unit individu yang sama dengan waktu yang berbeda. Dengan demikian akan memperoleh gambaran tentang perilaku beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu (Gujarati, 2012). Apabila setiap unit cross section memiliki jumlah observasi time series yang sama maka disebut sebagai balanced panel.

Terdapat tiga teknik pendekatan tiga pendekatan mendasar yang digunakan dalam menganalisis data panel yaitu (Mirza, 2017) :

a. Pendekatan Model Pooled Least Square (*Common Effect*).

Model ini dikenal dengan estimasi Common Effect Yaitu teknik regresi yang sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan data time series dan data cross section. Model ini hanya menggabungkan kedua data tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan Metode OLS (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan kuadrat kecil biasa. Dalam pendekatan ini hanya berasumsi perilaku data antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu, Pada beberapa penelitian data panel, model ini seringkali tidak digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yaitu tidak membedakan perilaku sehingga memungkinkan akan terjadi bias, tapi dalam model ini menggunakan perbandingan dari kedua pemilihan model lainnya

b. Pendekatan Model Efek Tetap (*Fixed Effect*).

Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan variabel boneka yang dikenal juga dengan sebutan model efek tetap atau *Least Square Dummy Variabel*. Metode ini estimasi dapat dilakukan dengan tidak adanya bobot (*Cross section weight*) atau *general Least Square* (GLS). Tujuan

dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi adanya heterogenitas antar unit *cross section*. Penggunaan metode ini untuk melihat perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data akan lebih dinamis dalam menginterpretasikan data. Pemilihan model *Common Effect* dan *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan pengujian *Likelihood Test Ratio* dengan ketentuan apabila nilai probabilitas yang akan dihasilkan signifikan dengan alpha maka akan dapat mengambil keputusan menggunakan *Fixed Effect Model*.

c. Pendekatan Model Efek Acak (*Random Effect*).

Model data dengan pendekatan ini yaitu model efek acak yang parameter-parameternya berbeda antar daerah maupun antar waktu yang dimasukkan ke dalam error. Dengan menggunakan model pendekatan ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien. Keputusan menggunakan model efek tetap maupun efek acak dapat ditentukan dengan menggunakan uji *Hausman* dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien. Keputusan penggunaan model efek tetap atau pun acak ditentukan dengan menggunakan uji Hausman dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat digunakan metode *Fixed Effect*, namun apabila sebaliknya maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Panel persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

di mana N adalah banyaknya data *cross-section*. Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

di mana T adalah banyaknya data time-series. Mengingat data panel merupakan gabungan dari time-series dan cross-section, maka model dapat ditulis dengan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e$$

Dimana :

Y = Penyerapan Tenaga Kerja (Dalam satuan Jiwa pertahun)

X1 = Upah Minimum (Dalam satuan rupiah)

X2 = Produk Domestik Regional Bruto (Dihitung dalam satuan Rupiah pertahun)

X3 = Investasi (Dihitung dalam Satuan Satuan Pertahun)

β_0 = Konstanta (besarnya Y apabila X1,X2,X3,X4 dianggap konstan)

β_1 = Koefisiensi Regresi Upah Minimum

β_2 = Koefisiensi Regresi Produk Domestik Regional Bruto

β_3 = Koefisiensi Regresi Investasi

e = Variabel Penyerapan Tenaga kerja

i = kabupaten/kota di Jawa Timur

t = waktu (tahun)

Regresi dengan data panel, secara umum mengakibatkan adanya kesulitan dalam spesifikasi model. Residualnya akan mempunyai tiga kemungkinan yaitu residual time series, cross section maupun gabungan keduanya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel. Penaksiran model data panel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *Fixed effect* dan pendekatan *Random effect* (Gujarati, 2012).

3.3 Pemilihan Metode

3.3.1 Uji Chow

Metode ini digunakan untuk mengetahui model yang lebih baik dari pengujian data panel, maka bisa dilakukan dengan penambahan variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dengan uji Statistik F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *Fixed Effect* lebih baik dari regresi model data panel tanpa menggunakan variabel dummy atau disebut dengan metode *Common Effect* (Mahulete, 2016). Hipotesis

nol pada uji adalah bahwa intersepsinya sama dengan kata lain model yang tepat untuk digunakan untuk regresi data panel adalah *Common Effect* dan hipotesis alternatif yang digunakan menurut intersepsinya yang tidak sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Fixed Effect*.

Nilai Statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak $n - k$ untuk denominator. M merupakan jumlah pembatasan yang ada dalam model Fixed effect. Jumlah observasi (n) adalah jumlah individu yang dikali dengan jumlah periode, sedangkan jumlah parameter dalam model fixed effect (k) adalah jumlah variabel yang dikali dengan jumlah individu dikali dengan jumlah periode. Apabila nilai F dihitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed effect. Dan sebaliknya apabila nilai F dihitung lebih kecil dari F kritis maka H_0 akan diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Common Effect.

3.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih apakah metode Fixed Effect dan metode Random Effect lebih baik dari metode Common Effect. Uji Hausman ini didasarkan dengan ide bahwa Least Squares Dummy Variabel (LSDV) dalam metode Fixed Effect dan Generalized Least Squares (GLS) dalam metode Random Effect merupakan efisien sedangkan dalam Ordinary Least Squares (OLS) dalam metode Common Effect tidak efisien. Di lain pihak, alternatifnya adalah metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. dalam uji hipotesis Nulnya adalah hasil dari estimasi dari keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut (Mahulete, 2016).

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel bebas. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect* dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai

kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect* (Ekananda, 2015).

3.4 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan untuk masalah di dalam data regresi. Uji klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), pada analisis ini regresi menggunakan untuk memperoleh model regresi yang bisa bertanggung jawab, maka asumsi-asumsi berikut harus menggunakan serta dipenuhi, apabila data regresi sudah melewati empat masalah dalam uji asumsi klasik maka dua dapat dikatakan dengan uji asumsi.

3.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak berlaku (Imam Ghozali, 2012).

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian oleh karenanya analisis tentang distribusi secara normal merupakan analisis pendahuluan dan menjadi prasyarat apakah suatu teknik analisis statistika dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Metode yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode kolmogorovsmirnov untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan.

Jika $Sig > 0,05$ maka data berdistribusi normal

Jika $Sig < 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

3.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji ini digunakan untuk melihat dimana korelasi antar variabel terikat. Jika ada dua variabel bebas maka dimana variabel tersebut berkorelasi sangat kuat maka secara logika persamaan regresinya diwakili oleh satu variabel saja. Multikolinieritas dinilai dari *Varians Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF < 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas; kebalikannya jika VIF > 10 maka dinyatakan terjadi multikolinieritas.

3.4.3 Uji Heteroskedisitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan yang satu dengan yang lain, apabila timbul ketidaksamaan varian maka persamaan yang dihasilkan bukanlah persamaan yang bersifat BLUE. Pada pembahasan kali ini untuk menguji apakah pada suatu data ada gejala Heteroskedisitas maka dilakukan uji Glejser. Pada prinsipnya uji ini menghitung nilai F dan membandingkan dengan F-table untuk melihat ada pengaruh variabel bebas terhadap harga untuk galatnya.

3.5 Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis, akan dilakukan beberapa uji antara lain uji koefisien regresi secara individual (uji-t), uji koefisien regresi secara keseluruhan (uji-F), uji koefisien determinasi (R^2).

1) Uji t (t-test)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variable Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi terhadap penyerapan tenaga di Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. dengan rumus sebagai berikut (Supranto, 1995:196).

$$t \text{ hitung} = \frac{\beta_i}{S_{\beta_i}}$$

Keterangan:

t : t hitung (pengujian secara parsial)

β_i : koefisien regresi linier berganda

S_{β_i} : standar deviasi

Rumusan Hipotesis:

1. $H_0 : \beta_i = 0$, artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur .
2. $H_i : \beta_i \neq 0$, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi terhadap tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur.

Kriteria pengujian :

1. Jika probabilitas $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, H_0 ditolak dan H_i diterima, maka variabel Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto, dan Investasi secara parsial ada berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Penyerapan Tenaga Kerja.
2. Jika probabilitas $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 diterima dan H_i ditolak, maka variabel Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto, dan Investasi secara parsial tiada berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Penyerapan tenaga kerja.

2) Uji Statistik F (F-Test)

Uji ini digunakan untuk menguji secara bersama-sama keseluruhan variabel bebas upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto, dan Investasi terhadap tingkat penyerapan Tenaga Kerja maka digunakan uji F dengan cara:

- a. Menentukan hipotesis yang akan diuji (H_0 dan H_a).
- b. Menentukan *level of sigificance* (α) tertentu.
- c. Menentukan kriteria pengujian dengan membandingkan nilai F-tabel dan Fhitung.
- d. Menarik kesimpulan

Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel, dimana nilai F hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(k - 1)}{(1 - R)/(n - k)}$$

Keterangan :

F : Pengujian secara bersama-sama

R^2 : Koefisien determinasi berganda

k : Banyaknya variabel

n : Banyaknya observasi (sampel)

$k-1$: Derajat bebas pembilang

$n-k$: Derajat bebas penyebut

Rumusan Hipotesa:

1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya secara bersama-sama variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
2. $H_i : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, artinya secara bersama-sama variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujian:

1. Jika probabilitas $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
2. Jika probabilitas $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa seluruh variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3) Uji Determinasi Berganda (Uji R^2)

Uji ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas yaitu Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto, dan Investasi terhadap variabel terikat yaitu Penyerapan Tenaga Kerja dalam persamaan regresi digunakan analisis koefisien determinasi dengan formula sebagai berikut:

(Suparno, 1995:258-260).

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

$$R^2 = \frac{b_1 \sum X_1 + b_2 \sum X_2 + b_3 \sum X_3}{\sum Y^2}$$

Keterangan:

R^2 = koefisien regresi

ESS = jumlah kuadrat regresi/ *Explained of squares* ($1 \sum 1 + 2 \sum 2$)

RSS = jumlah kuadrat kesalahan regresi/ *Total sum of squares* ($\sum 1$)

TSS = jumlah kuadrat total (ESS+RSS)

Batas nilai R_2 adalah : $0 < R_2 < 1$ (Supranto, 1995 : 219).

Kriteria pengujian:

1. Jika nilai R_2 adalah mendekati 1, maka pengaruh Upah minimum, PDRB, dan Investasi terhadap Penyerapan tenaga kerja Kabupaten/ Kota dan positif, artinya apabila ada kenaikan dalam Upah minimum, PDRB, dan Investasi terhadap Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur.
2. Jika nilai R_2 adalah mendekati 0, maka pengaruh Upah minimum, PDRB, dan Investasi terhadap Penyerapan tenaga kerja Kabupaten/ Kota lemah atau tidak ada hubungan, artinya apabila ada kenaikan atau penurunan pada Upah minimum, PDRB, dan Investasi tidak akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan pada variable penyerapan tenaga kerja.
3. Jika nilai R_2 adalah mendekati -1, maka pengaruh variable Upah minimum, PDRB, dan Investasi terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja Kabupaten/ Kota sempurna dan negatif, artinya apabila ada kenaikan Pertumbuhan Upah minimum, PDRB, dan Investasi menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja.

3.6 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang tidak tepat dan meluasnya permasalahan, maka terdapat batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga Kerja (Y) adalah jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2017 yang dinyatakan dalam satuan juta jiwa.
2. Upah Minimum (X1) yang berlaku di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2011-2017 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinyatakan dalam satuan rupiah perbulan.
3. Produk Domestik Regional Bruto (X2) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan semua unit atau sektor pada suatu wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017 yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah pertahun.

4. Investasi (X3) adalah keseluruhan nilai investasi yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan menggunakan modal dalam negeri di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017 yang diukur dalam satuan juta rupiah pertahun.



Pada tabel 4.11 menunjukkan hasil F dihitung sebesar 1287.685 dan pada prob (F-statistik) sebesar 0,000000. Dari hasil regresi tersebut terbukti Prob F hitung (0,000000) lebih kecil dari level signifikan $\alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti untuk mengetahui pengaruh masing-masing koefisien regresi UMK, PDRB, dan Investasi PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur 2011-2017.

4.4.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing koefisien regresi UMK, PDRB, dan Investasi PMDN terhadap Penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017 secara parsial. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel independent dengan membandingkan nilai probabilitas t-Statistic dengan tingkat signifikan 0,05. Bila nilai probabilitas $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya setiap variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. Hasil analisis data Uji t yang disajikan pada tabel 4.12

Tabel 4.10 Hasil Uji t

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 451444.9 | 8028.222 | 56.23224 | 0.0000 |
| UMK | 0.016053 | 0.005031 | 3.191133 | 0.0016 |
| PDRB | 1.196906 | 0.348499 | 3.434460 | 0.0007 |
| INVESTASI | -0.000725 | 0.001846 | -0.392670 | 0.6949 |

Sumber : Lampiran B, diolah.

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh masing-masing variabel independent sebagai berikut:

1. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0016 artinya nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga variabel UMK berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur.
2. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0007 artinya nilai probabilitas lebih kecil dari

tingkat signifikan 0,05 sehingga variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur.

3. Variabel Investasi PMDN (INV) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.6949 artinya nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan 0,05, sehingga variabel Investasi PMDN berpengaruh tidak signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur.

4.4.3 Koefisien Determinasi (uji R)

Koefisien Regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1, jika nilai koefisien determinasi mendekati 1 maka model memiliki pengaruh yang kuat dalam menjelaskan variabel dependen, namun jika mendekati 0 maka model memiliki pengaruh yang lemah dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji R^2 yang disajikan pada Tabel 4.13

Tabel 4.11 Hasil Uji R^2 (Koefisien Determinasi Regresi)

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.995651 | Mean dependent var | 514084.1 |
| Adjusted R-squared | 0.994877 | S.D. dependent var | 310984.3 |
| S.E. of regression | 22257.69 | Akaike info criterion | 22.99964 |
| Sum squared resid | 1.11E+11 | Schwarz criterion | 23.55198 |
| Log likelihood | -3017.952 | Hannan-Quinn criter. | 23.22154 |
| F-statistic | 1287.685 | Durbin-Watson stat | 1.793468 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Sumber : Lampiran B, diolah

Berdasarkan hasil uji R^2 didapat hasil dari Adjusted R-squared yaitu 0.995651. Hal ini berarti 99,48% perubahan jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dipengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Investasi PMDN.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan asumsi klasik yang terdapat didalam model regresi. Pada uji asumsi klasik ini terdapat 3 uji yaitu Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastitas, dan Uji Normalitas.

4.5.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dan model regresi. Dengan menggunakan koefisien korelasi antara variabel bebas bila lebih besar 0,80 maka kolinieritas berganda merupakan masalah serius, namun jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari 0,80 maka tidak terjadi masalah multikolinieritas (Mahyus Ekananda, 2015:95). Hasil uji multikolinieritas disajikan pada Tabel 4.14

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas

| | X1 | LOGX2 | X3 |
|-------|----------|----------|----------|
| X1 | 1.000000 | 0.561107 | 0.495280 |
| LOGX2 | 0.561107 | 1.000000 | 0.588152 |
| X3 | 0.495280 | 0.588152 | 1.000000 |

Sumber : Lampiran D, diolah

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa hasil Uji Multikolinieritas dengan menggunakan Uji Correlation tidak terjadi masalah multikolinieritas karena setiap variabel bebas tidak memiliki nilai yang diatas 0,80 maka dapat disimpulkan model terbebas dari Multikolinieritas.

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian metode Uji Brounce pegan yaitu dengan meregresikan nilai residual dengan masing-masing variabel dependen. Hasil dari uji heteroskedastisitas yang di sajikan pada Table 4.15.

Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Brounce pegan)

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 1.182346 | Prob. F(3,262) | 0.3169 |
| Obs*R-squared | 3.553087 | Prob. Chi-Square(3) | 0.3139 |
| Scaled explained SS | 4.346597 | Prob. Chi-Square(3) | 0.2264 |

Sumber : Lampiran D, diolah

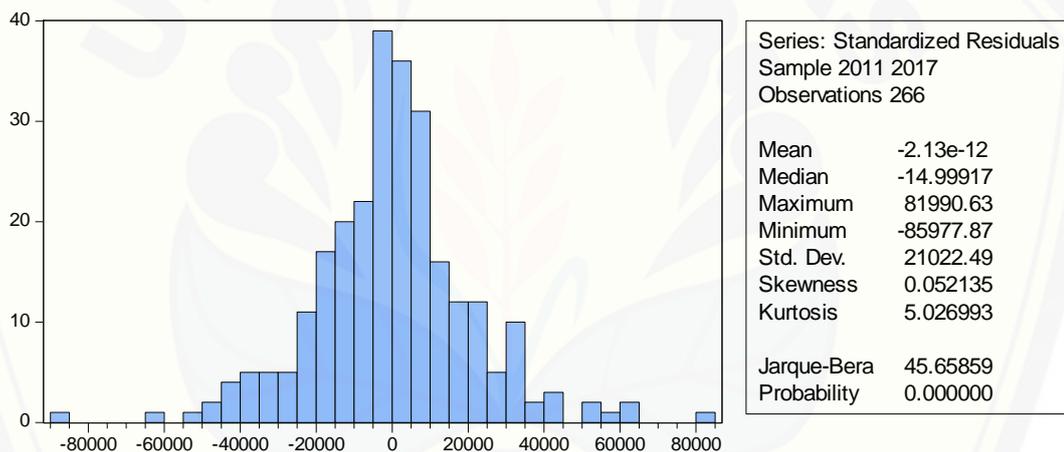
Berdasarkan Tabel 4.15 pada Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Brounce Pegan dapat menghasilkan nilai probabilitas dari setiap

variabel bebas lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga model tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas.

4.5.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terdapat variabel pengganggu yang memiliki distribusi normal atau tidak. Uji Normalitas dapat dilakukan dengan melakukan Uji Jarque-Berra. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Nilai probabilitas J-B hitung \leq nilai probabilitas ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual e adalah berdistribusi normal ditolak.
2. Nilai probabilitas J-B hitung \geq nilai probabilitas ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual e adalah berdistribusi normal diterima.



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas (Sumber: Lampiran D, diolah)

Gambar 4.2 menunjukkan hasil dari Uji Normalitas, berdasarkan gambar diatas model yang menjelaskan pengaruh UMK, PDRB dan Investasi PMDN di Provinsi Jawa Timur 2011-2017. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (Best Linier Unbias Estimator) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi. Dari penjelasan tersebut bahwa pada data panel tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heterokedasitas saja yang diperlukan (Basuki 2016:72-73). Menurut Gujarati (2003:160) apabila uji normalitas menunjukkan bahwa yang digunakan dalam penelitian ini cenderung tidak normal maka dapat diasumsi Central Limit Theorem yaitu jika jumlah

observasi cukup besar ($n > 30$) maka asumsi normalitas dapat diabaikan, dalam penelitian ini sampel yang didapatkan sebanyak 266.

4.6 Pembahasan

Hasil secara parsial atau Uji t dapat diketahui dimana variabel UMK memiliki pengaruh yang signifikan positif dimana lebih kecil dari tingkat signifikan, yang artinya pada setiap peningkatan UMK akan meningkatkan jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Variabel PDRB berpengaruh signifikan positif dengan nilai dimana lebih besar dari tingkat signifikan, yang artinya setiap peningkatan PDRB berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan variabel Investasi PMDN berpengaruh tidak signifikan dengan nilai koefisien dimana lebih besar dari tingkat signifikan, yang artinya saat Investasi PMDN mengalami peningkatan, tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Hasil dari koefisien determinasi (R^2), variabel bebas UMK, PDRB, dan Investasi PMDN berpengaruh terhadap variabel terikat dengan jumlah penduduk bekerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2017.

Penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya orang yang tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau sebuah instansi. Penyerapan tenaga kerja yang akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila dengan adanya lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Kebijakan negara dalam penyerapan tenaga kerja meliputi dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan pekerjaan disetiap daerah,serta perkembangan dengan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang telah tersedia dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah yang nilai koefisien regresi positif.

Di Provinsi Jawa Timur juga terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki nilai koefisien regresi rendah dan bernilai negatif. Kabupaten/Kota dengan nilai koefisien regresi rendah dan bahkan bernilai negatif yaitu Kota Mojokerto, Kota Kediri dan Kota Blitar. Hal ini menunjukkan hasil dari penelitian oleh Muhammad Yasin (2017) yang berjudul “ Analisis Pengaruh Upah

Minimum, PDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur” bahwa penyerapan tenaga kerja masih berpengaruh terhadap Upah Minimum, PDRB dan Investasi PMDN pada daerah tersebut. Dimana hal itu menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Magetan tersebut memiliki tingkat kesempatan kerja yang cukup rendah sehingga banyak tenaga kerja yang belum terserap di keempat Kabupaten tersebut, mungkin dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat produktivitas masyarakat rendah, ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan, faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan yang menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja di ketiga Kota tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang berarti terdapat peningkatan produksi, sehingga akan menambah jumlah lapangan pekerjaan, yang akhirnya dapat menyerap tenaga kerja pada setiap daerah (Mankiw, 2000). Dimana kebijakan negara dalam penyerapan tenaga kerja meliputi upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan pekerjaan di setiap daerah, serta perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang telah tersedia dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing.

4.6.1 Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan dari hasil analisis data panel dengan menggunakan pendekatan fixed effect dimana UMK yang berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur yang artinya pada setiap peningkatan UMK maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang terdapat dalam penelitian terdahulu.

Perkembangan tingkat Upah Minimum Provinsi dapat dilihat bahwa pada setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Kenaikan jumlah UMP Jawa Timur dapat disebabkan beberapa faktor yang salah satunya yaitu pembangunan diseluruh sektor. Banyaknya pembangunan pabrik sektor industri yang mengakibatkan kenaikan UMP Jawa Timur. Selain pembangunan pabrik terdapat pembangunan mall dan

hotel yang sangat banyak di Jawa Timur. Dengan terjadinya kenaikan UMP di Jawa Timur dapat mendorong tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan juga bagi sektor usaha, kenaikan upah minimum ini tidak disikapi oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja melainkan untuk dijadikan sebagai strategi dalam meningkatkan kinerja pekerja yang dapat mendorong produktivitas yang tinggi dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada dan menyerap tenaga kerja.

Hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan didukung oleh Kuncoro (2002) yang sejalan dengan penelitian ini mengatakan bahwa secara tingkat signifikan upah minimum mempengaruhi daya beli masyarakat yang mengakibatkan permintaan menjadi meningkat serta diikuti oleh semakin banyaknya perusahaan yang masuk dalam pasar sehingga pada penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan juga akan semakin meningkat dan karena dengan adanya tingkat upah yang dinaikkan para pengusaha akan mengupayakan untuk mendapatkan tingkat dan menambah jumlah unit usahanya sehingga diharapkan dengan adanya penambahan dari unit usaha, pengusaha juga akan menambah jumlah dari tenaga kerjanya.

Hal berikut sejalan dengan Teori Klasik yang menyatakan bahwa hubungan antara Upah dengan Penyerapan tenaga kerja naik maka akan menyebabkan pertambahan penduduk sehingga permintaan akan barang akan meningkat pula sehingga untuk menambah produksinya produsen manambah faktor-faktor produksi terutama tenaga kerja.

4.6.2 Pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan dari hasil regresi data panel dengan menggunakan pendekatan fixed effect dimana PDRB yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Yang artinya setiap peningkatan PDRB meningkatkan jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Didalam perekonomian suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya tetapi dalam penelitian ini setiap pertumbuhan dalam produksi barang dan jasa tidak bisa mempengaruhi peningkatan pada penyerapan tenaga kerja. Perumbuhan ekonomi

merupakan siklus dimana ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaan saling berkaitan dan mampu menambah tenaga kerja, dimana tenaga kerja adalah modal untuk Bergeraknya roda pembangunan suatu wilayah yaitu dalam proses produksi. Menurut Teori Lewis, semua sektor dalam ekonomi harus tumbuh serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat diantara industri dan sektor pertanian. Dalam keadaan yang demikian peranan pertumbuhan ekonomi mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja bersumber dari ekspansi kegiatan sektor modern (Jhingan, 2016).

Pada dasarnya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang memacu pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur dengan peningkatan PDRB karena adanya kontribusi dari lapangan usaha seperti sektor pertambangan pada suatu daerah dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, sektor jasa-jasa. Banyaknya sektor-sektor tentu akan mempengaruhi jumlah output yang dikeluarkan. Jumlah output yang dikeluarkan dari berbagai sektor tersebut akan mengakibatkan penambahan jumlah tenaga kerja karena untuk menghasilkan output yang baik tentu diperlukan tenaga kerja yang memiliki produktivitas. Selain itu adanya pergeseran sektor primer ke sektor sekunder di Provinsi Jawa Timur mengakibatkan perlunya tenaga kerja yang kompeten dan dapat keahlian tenaga kerja dalam tingkatan yang relatif tinggi.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Wasilaputri (2016) menjelaskan bahwa peningkatan nilai PDRB menandakan bahwa jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah juga meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi sehingga partisipasi angkatan kerja akan bertambah.

Hal ini sesuai dengan teori Hukum Okun (Okun's Law) yang menjelaskan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga

kerja, bahwa jika terjadi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terjadi disuatu daerah maka penyerapan tenaga kerja disuatu daerah tersebut juga akan meningkat. Hukum Okun (Okun's law) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1% dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2%. Dengan kata lain, PDRB yang pada akhirnya mempengaruhi GDP berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

4.6.3 Pengaruh Investasi PMDN terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan Hasil dari analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan fixed effect dimana investasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Hal ini artinya bahwa hasil yang tidak signifikan dari penelitian ini karena tidak adanya pengaruh investasi PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur karena adanya alasan seperti ada kegiatan investasi yang masih banyak berupa non bangunan, yang cenderung bersifat *maintenance* mesin yang dilakukan secara regular ataupun peremajaan mesin lama tanpa menambah kapasitas produksi. Kondisi ini yang mendorong pada peningkatan impor barang modal, yang didominasi impor mesin. Tercatat pertumbuhan kelompok mesin industri meningkat tinggi dari 12% menjadi 43%. Para pemilik usaha dalam menggunakan investasinya lebih cenderung untuk melakukan pembelian barang modal dalam bentuk mesin-mesin sebagai pendukung dalam proses produksi pada perusahaan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produksi dan meningkatkan produktivitas dari barang dan jasa yang lebih efektif dan efisien, akibat dari penggunaan mesin tersebut maka penyerapan tenaga kerja menjadi rendah.

Hasil ini di dukung oleh penelitian Wasilaputri (2016) bahwa investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau jawa. Tidak adanya pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja diduga karena para pemilik usaha dalam menggunakan investasinya lebih cenderung untuk melakukan pembelian barang modal dalam bentuk mesin-mesin sebagai pendukung proses produksi perusahaan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produksi dan meningkatkan produktivitas dari barang dan

jasa yang lebih efektif dan efisien, akibat penggunaan mesin tersebut maka penyerapan tenaga kerja menjadi rendah.

Pada penelitian ini tidak sejalan dengan Teori Harrod-Domar yang menyatakan hubungan antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja adalah investasi tidak hanya untuk menciptakan permintaan, tetapi juga untuk memperbesar dimana kapasitas produksi. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang secara otomatis meningkatkan penggunaan yang diharapkan. Apabila keuntungan yang menyatakan bahwa investasi dipengaruhi oleh *Marginal efisiensi of capital* (MEC) yaitu keuntungan yang diharapkan. Apabila keuntungan yang diharapkan naik maka perusahaan akan melakukan investasi. Kenaikan investasi bisa disebabkan dengan adanya kenaikan pendapatan dan muncul permintaan yang lebih atas barang konsumsi pada giliran yang menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan pada permintaan tenaga kerja atas barang dan jasa (Jhingan, 2016).

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2011-2017 dengan menggunakan variabel Upah Minimum, Produk Domestik regional Bruto, dan Investasi PMDN terhadap penyerapan Tenaga Kerja. Pada penelitian ini yang menghasilkan beberapa kesimpulan :

1. Hasil pengujian regresi data panel atas upah minimum terhadap jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur menunjukkan hubungan positif dan signifikan, Maka dengan meningkatkan upah minimum di Jawa Timur yang menaikkan pada pengusaha yang diupayakan untuk dapat meningkatkan dan menambah jumlah dari unit usahanya sehingga diharapkan dengan adanya penambahan dari jumlah unit usaha, pengusaha juga akan menambah dari penyerapan tenaga kerja.
2. Hasil pengujian regresi data panel pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari di Provinsi Jawa Timur peningkatan PDRB diakibatkan karena adanya distribusi dari lapangan usaha seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, dan sektor jasa-jasa. Dari banyaknya sektor-sektor tentu akan mempengaruhi jumlah output yang dikeluarkan. Jumlah output yang dikeluarkan dari berbagai sektor tersebut akan dapat mengakibatkan penambahan jumlah tenaga kerja karena dapat menghasilkan output yang baik akan diperlukan tenaga kerja.
3. Hasil pengujian regresi data panel atas Investasi terhadap jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan. Hal ini disebabkan dari kegiatan investasi yang masih dilakukan secara reguler ataupun peremajaan mesin lama tanpa menambah kapasitas produksi. Akibat dari penggunaan mesin tersebut maka penyerapan tenaga kerja menjadi rendah.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dikemukakan dan dapat dikaitkan dengan kesimpulan yang diperoleh, maka yang perlu disarankan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pada Pemerintahan hendaknya daerah yang akan menyusun kebijakan pengupahan sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan produktifitasnya tenaga kerja dan pertumbuhan produksi serta meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pada pekerja perusahaan?instansi. Sehingga kebijakan pengupahan akan berorientasi kepada kepentingan seluruh pihak.
2. Pemerintahan daerah hendaknya juga mendorong dan memacu untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto disetiap sektor ekonomi sehingga Penyerapan Tenaga Kerja dapat meningkatkan.
3. Pemerintah daerah hendaknya mendorong untuk berinvestasi pada sektor-sektor yang padat karya serta lebih selektif dalam memberikan ijin bagi pemilik modal terkait dengan proyek-proyek yang akan direalisasikan sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Astawan, Si Kadek ayu. 2015. “ *Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 -2012*”.

Barthos, B. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makro*”. PT Bumi Aksara. Jakarta.

BPS Provinsi Jawa Timur,2017 *Keadaan Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur : BPS Provinsi Jawa Timur*

BPS Provinsi Jawa Timur 2013 *Laporan Eksekutif Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2013 - 2014* : BPS Provinsi Jawa Timur.

BPS Provinsi Jawa Timur 2015 *Laporan Eksekutif Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2015- 2016* : BPS Provinsi Jawa Timur.

BPS Provinsi Jawa Timur 2016 *Laporan Eksekutif Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2016- 2017* : BPS Provinsi Jawa Timur.

Damodar Gujarati, 2003, *Basic Econometrics Fourth Edition*, Penerbit *United States Military Academy, New York*.

Dornbusch, R., S. Fischer, dan R. Startz, 2004. “ Makroekonomi”. Edisi Keempat. J. Mulyadi (penerjemah). Erlangga, Jakarta.

Dimas. Nenek Woyanti. 2009. “ *Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta*”. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 16. 1

Jhingan, M.L. 2004. “ *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*”. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gujarati, D. 1999, “Ekonomi Dasar”, Alih Bahasa Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta.

Gujarati, Damodar, 2004. *Basic Econometrics (Ekonometrika Dasar)*. Alih Bahasa Sumarno Zain. Erlangga, Jakarta

Khusnul Ashar . 2015. “ *Analisis Hubungan Pembangunan Ekonomi Daerah Kebijakan Publik,dan Kesempatan Sektoral* “.

Kuncoro, Mudjarat. 2000. “ *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*”. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.

Mankiw, N. Gregory. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.

Muhammad safri. 2018. “ *Pengaruh PDRB, Upah Minimum, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi*”.

Payaman , J Simanjutak. 2001 . “ *Pengantar Sumber Daya Manusia* “, Universitas Indonesia, Jakarta.

Payaman , J Simanjutak. 2002 . “ *Pengantar Sumber Daya Manusia* “, Universitas Indonesia, Jakarta.

Rezky Fatma Dewi ; Purwaka Hari Prihanto ; Jaya Kusuma Edy. 2016 . “ *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat* “.

Subagiarta, I.W. 2006. “ *Sumber Daya Manusia*”. Jember : FE Universitas Jember.

Sadono, Sukirno, 2001. *Pengantar Teori Makro. Edisi Kedua PT Raja Grafindo Persada, Jakarta*.

Sukirno, Sadono. 2013. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subagiarta, I.W. 2006. “ *Sumber Daya Manusia*”. Jember : FE Universitas Jember.

Yasin Muhammad. 2017. “*Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Investasi PMDN Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur*”. Skripsi FEB Universitas Jember.

Todaro Michael, 1998. “ *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*”. Gelora Aksara, Jakarta.

LAMPIRAN A1

Data Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Jawa Timur tahun 2011-2017

| Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Bekerja Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2017 (Jiwa) | | | | | | |
|------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Pacitan | 345898 | 339352 | 339681 | 345270 | 349759 | 349280 | 348768 |
| Ponorogo | 446382 | 483962 | 474183 | 478260 | 467372 | 487811 | 485697 |
| Trenggalek | 396804 | 399772 | 397668 | 382330 | 394587 | 378767 | 399122 |
| Tulungagung | 527516 | 536567 | 536447 | 551480 | 525867 | 524884 | 554475 |
| Blitar | 569840 | 618580 | 603443 | 587403 | 580982 | 619050 | 616952 |
| Kediri | 700249 | 769257 | 754316 | 747065 | 760682 | 826827 | 783578 |
| Malang | 1188413 | 1278427 | 1242884 | 1212028 | 1228309 | 1257912 | 1354311 |
| Lumajang | 466105 | 501928 | 505090 | 500104 | 518184 | 500530 | 539800 |
| Jember | 1172949 | 1106262 | 1123266 | 1103779 | 1117132 | 1215130 | 1224493 |
| Banyuwangi | 733971 | 851945 | 838622 | 780835 | 871029 | 878895 | 870242 |
| Bondowoso | 377315 | 395928 | 386153 | 400655 | 417437 | 435036 | 419 497 |
| Situbondo | 331391 | 346240 | 345122 | 334065 | 351821 | 377294 | 382791 |
| Probolinggo | 596345 | 624454 | 598256 | 592540 | 586555 | 573832 | 587351 |
| Pasuruan | 784210 | 766766 | 795706 | 806291 | 762757 | 778563 | 811710 |
| Sidoarjo | 957899 | 957887 | 996960 | 1028243 | 1015208 | 1021884 | 1042877 |
| Mojokerto | 488795 | 539139 | 528416 | 532294 | 552002 | 589641 | 590384 |
| Jombang | 557227 | 570047 | 560677 | 577679 | 607856 | 630238 | 642854 |
| Nganjuk | 480019 | 508859 | 523384 | 513031 | 506132 | 487899 | 541279 |
| Madiun | 340017 | 349831 | 349178 | 350522 | 327148 | 338495 | 362591 |
| Magetan | 338847 | 342553 | 342882 | 328845 | 331493 | 375773 | 377716 |
| Ngawi | 397707 | 410090 | 448634 | 412831 | 413822 | 411125 | 479989 |
| Bojonegoro | 577451 | 633960 | 654915 | 608174 | 608181 | 665600 | 633437 |
| Tuban | 552400 | 556649 | 590812 | 548541 | 584743 | 631783 | 640855 |
| Lamongan | 544619 | 592097 | 612448 | 585311 | 607096 | 612030 | 614693 |
| Gresik | 535346 | 532304 | 591514 | 562559 | 577049 | 632529 | 625842 |
| Bangkalan | 416538 | 444345 | 442663 | 446517 | 457282 | 460988 | 468316 |
| Sampang | 460147 | 482807 | 447743 | 496322 | 447470 | 465897 | 461237 |
| Pamekasan | 441214 | 461339 | 469849 | 459046 | 425333 | 445268 | 444701 |
| Sumenep | 636110 | 629881 | 613293 | 616145 | 580887 | 618330 | 608592 |
| Kota Kediri | 123522 | 129938 | 125726 | 134293 | 130564 | 137918 | 140278 |
| Kota Blitar | 62730 | 63854 | 64373 | 65402 | 72650 | 74752 | 75618 |
| Kota Malang | 402875 | 386483 | 401435 | 393050 | 377329 | 411042 | 423951 |
| Kota Probolinggo | 99075 | 106176 | 101550 | 107668 | 104953 | 114782 | 111527 |
| Kota Pasuruan | 86364 | 91303 | 92850 | 91212 | 92058 | 94873 | 94782 |
| Kota Mojokerto | 57101 | 61407 | 62123 | 61771 | 63806 | 64805 | 66833 |
| Kota Madiun | 79897 | 78855 | 84179 | 80613 | 86092 | 90415 | 86875 |
| Kota Surabaya | 1230165 | 1361648 | 1404445 | 1380157 | 1365180 | 1406358 | 1426945 |
| Kota Batu | 101413 | 100364 | 103024 | 104177 | 100970 | 112984 | 108990 |

Sumber: BPS Jawa Timur, 2017 (data diolah)

LAMPIRAN A2

Data Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011-2017

Tabel 4.3 Upah Minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2011-2017(Rupiah)

| Wilayah | Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017 | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Kota Surabaya | 1.115.000 | 1.257.000 | 1.740.000 | 2.200.000 | 2.710.000 | 3.045.000 | 3.296.212 |
| Gresik | 1.133.000 | 1.257.000 | 1.740.000 | 2.195.000 | 2.707.500 | 3.042.500 | 3.293.506 |
| Sidoarjo | 1.107.000 | 1.252.000 | 1.720.000 | 2.190.000 | 2.705.000 | 3.040.000 | 3.290.800 |
| Pasuruan | 1.107.000 | 1.252.000 | 1.720.000 | 2.190.000 | 2.700.000 | 3.037.500 | 3.288.093 |
| Mojokerto | 1.105.000 | 1.234.000 | 1.700.000 | 2.050.000 | 2.695.000 | 3.030.000 | 3.278.975 |
| Malang | 1.077.600 | 1.130.000 | 1.343.700 | 1.635.000 | 1.962.000 | 2.188.000 | 2.368.510 |
| Kota Malang | 1.079.887 | 1.132.000 | 1.340.300 | 1.587.000 | 1.882.500 | 2.099.000 | 2.272.167 |
| Kota Batu | 1.050.000 | 1.100.215 | 1.268.000 | 1.580.037 | 1.877.000 | 2.026.000 | 2.193.145 |
| Jombang | 865.500 | 978.200 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.725.000 | 1.924.000 | 2.082.730 |
| Tuban | 935.000 | 970.000 | 1.144.400 | 1.370.000 | 1.575.500 | 1.757.000 | 1.901.952 |
| Kota. Pasuruan | 926.000 | 1.252.000 | 1.195.800 | 1.360.000 | 1.575.000 | 1.757.000 | 1.901.952 |
| Probolinggo | 814.000 | 888.500 | 1.198.600 | 1.353.750 | 1.556.800 | 1.736.000 | 1.879.220 |
| Jember | 875.000 | 920.000 | 1.091.950 | 1.270.000 | 1.460.500 | 1.629.000 | 1.763.392 |
| Kota Mojokerto | 835.000 | 875.000 | 1.040.000 | 1.250.000 | 1.437.500 | 1.603.000 | 1.735.247 |
| Probolinggo | 810.500 | 885.000 | 1.103.200 | 1.250.000 | 1.437.500 | 1.603.000 | 1.735.247 |
| Banyuwangi | 865.000 | 915.000 | 1.086.400 | 1.240.000 | 1.426.000 | 1.599.000 | 1.730.917 |
| kab. Lamongan | 900.000 | 950.000 | 1.075.700 | 1.220.000 | 1.410.000 | 1.573.000 | 1.702.772 |
| Kota Kediri | 975.000 | 1.037.500 | 1.128.400 | 1.165.000 | 1.339.750 | 1.494.000 | 1.617.255 |
| Bojonegoro | 870.000 | 930.000 | 1.029.500 | 1.140.000 | 1.311.000 | 1.462.000 | 1.582.615 |
| Kediri | 934.500 | 999.000 | 1.089.950 | 1.135.000 | 1.305.250 | 1.456.000 | 1.576.120 |
| Lumajang | 740.700 | 825.391 | 1.011.950 | 1.120.000 | 1.288.000 | 1.437.000 | 1.555.552 |
| Tulungagung | 720.000 | 815.000 | 1.007.900 | 1.107.000 | 1.273.050 | 1.420.000 | 1.537.150 |
| Bondowoso | 735.000 | 800.000 | 946.000 | 1.105.000 | 1.270.750 | 1.417.000 | 1.533.902 |
| Bangkalan | 850.000 | 885.000 | 983.800 | 1.102.000 | 1.267.300 | 1.414.000 | 1.530.655 |
| Nganjuk | 710.000 | 785.000 | 960.200 | 1.131.000 | 1.265.000 | 1.411.000 | 1.527.407 |
| Blitar | 750.000 | 815.000 | 946.850 | 1.000.000 | 1.260.000 | 1.405.000 | 1.520.912 |
| Sumenep | 785.000 | 825.000 | 965.000 | 1.090.000 | 1.253.500 | 1.398.000 | 1.513.335 |
| Kota Madiun | 745.000 | 812.000 | 953.000 | 1.066.000 | 1.250.000 | 1.394.000 | 1.509.005 |
| Kota Blitar | 737.000 | 815.000 | 924.800 | 1.000.000 | 1.243.200 | 1.394.000 | 1.509.005 |
| Sampang | 725.000 | 800.000 | 1.104.600 | 1.120.000 | 1.231.650 | 1.387.000 | 1.501.427 |
| Sitobondo | 733.000 | 802.500 | 1.048.000 | 1.071.000 | 1.209.900 | 1.374.000 | 1.487.355 |
| Pamekasan | 925.000 | 975.000 | 1.059.600 | 1.090.000 | 1.201.750 | 1.350.000 | 1.461.375 |
| Madiun | 720.000 | 775.000 | 960.750 | 1.045.000 | 1.196.000 | 1.340.000 | 1.450.550 |
| Ngawi | 725.000 | 780.000 | 900.000 | 1.040.000 | 1.150.000 | 1.334.000 | 1.444.055 |
| Ponorogo | 705.000 | 745.000 | 924.000 | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.283.000 | 1.388.847 |
| Pacitan | 705.000 | 750.000 | 887.250 | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.283.000 | 1.388.847 |
| Trenggalek | 710.000 | 760.000 | 903.900 | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.283.000 | 1.388.847 |
| Magetan | 705.000 | 750.000 | 903.900 | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.283.000 | 1.388.847 |

Sumber : BPS Jawa Timur, 2017 (data diolah)

LAMPIRAN A3

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011-2017

Tabel 4.4 PDRB di Jawa Timur 2011-2017 (Milyar)

| Wilayah | Produk Domestik Regional Bruto Menurut Provinsi Jawa Timur 2010-2016 | | | | | | |
|------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Pacitan | 7.246,20 | 7.705,00 | 8.157,60 | 8.582,20 | 9.019,50 | 9.489,10 | 13.810,30 |
| Ponorogo | 9.472,20 | 10.038,40 | 10.554,50 | 11.104,10 | 11.686,20 | 12.305,70 | 17.760,40 |
| Trenggalek | 8.435,20 | 8.959,50 | 9.496,70 | 9.998,40 | 10.500,80 | 11.026,50 | 16.116,70 |
| Tulungagung | 17.845,20 | 18.999,00 | 20.164,30 | 21.265,20 | 22.326,60 | 23.446,40 | 33.740,20 |
| Blitar | 17.093,90 | 18.054,50 | 18.967,30 | 19.920,20 | 20.925,50 | 21.991,40 | 31.654,90 |
| Kediri | 19.354,90 | 20.538,30 | 21.733,50 | 22.889,30 | 24.005,50 | 25.211,90 | 35.870,60 |
| Malang | 44.091,30 | 47.076,00 | 49.571,70 | 52.549,60 | 55.316,30 | 58.247,30 | 89.180,20 |
| Lumajang | 15.144,40 | 16.053,40 | 16.949,60 | 17.852,10 | 18.677,70 | 19.555,20 | 28.703,90 |
| Jember | 35.208,20 | 37.262,00 | 39.519,20 | 41.968,80 | 44.204,10 | 46.526,60 | 67.476,10 |
| Banyuwangi | 34.720,40 | 37.235,70 | 39.733,60 | 41.997,60 | 44.523,50 | 46.924,60 | 72.245,70 |
| Bondowoso | 9.033,00 | 9.583,40 | 10.140,10 | 10.651,90 | 11.178,70 | 11.735,60 | 17.156,70 |
| Situbondo | 8.927,10 | 9.411,60 | 9.993,80 | 10.572,40 | 11.086,50 | 11.640,80 | 17.545,00 |
| Probolinggo | 15.912,50 | 16.936,80 | 17.808,90 | 18.681,30 | 19.570,40 | 20.504,10 | 29.993,80 |
| Pasuruan | 65.271,60 | 70.167,10 | 75.044,00 | 80.105,30 | 84.412,00 | 89.011,20 | 124.979,80 |
| Sidoarjo | 87.212,40 | 93.543,90 | 99.992,50 | 106.435,50 | 112.012,50 | 118.179,20 | 174.280,10 |
| Mojokerto | 36.405,80 | 39.047,30 | 41.608,40 | 44.292,10 | 46.792,80 | 49.321,90 | 70.863,20 |
| Jombang | 18.385,00 | 19.514,80 | 20.672,30 | 21.793,20 | 22.960,20 | 24.199,10 | 34.940,00 |
| Nganjuk | 12.061,20 | 12.767,00 | 13.456,00 | 14.142,60 | 14.875,70 | 15.661,80 | 22.892,10 |
| Madiun | 8.608,70 | 9.135,70 | 9.654,10 | 10.169,70 | 10.705,10 | 11.268,90 | 16.417,70 |
| Magetan | 8.744,80 | 9.251,20 | 9.792,60 | 10.292,40 | 10.824,10 | 11.398,10 | 16.343,40 |
| Ngawi | 8.973,30 | 9.568,20 | 10.094,00 | 10.681,00 | 11.224,00 | 11.807,60 | 17.810,60 |
| Bojonegoro | 36.751,00 | 38.136,10 | 39.039,40 | 39.934,40 | 46.892,80 | 57.187,40 | 64.886,20 |
| Tuban | 29.934,30 | 31.816,30 | 33.678,80 | 35.519,40 | 37.254,70 | 39.081,80 | 56.501,10 |
| Lamongan | 17.360,50 | 18.562,70 | 19.848,80 | 21.100,10 | 22.316,80 | 23.623,80 | 34.370,50 |
| Gresik | 62.898,70 | 67.248,80 | 71.314,20 | 76.336,70 | 81.359,40 | 85.835,10 | 118.624,60 |
| Bangkalan | 16.406,50 | 16.173,70 | 16.204,00 | 17.369,80 | 16.907,10 | 17.018,60 | 21.674,60 |
| Sampang | 10.315,30 | 10.910,90 | 11.623,80 | 11.632,90 | 11.874,50 | 12.606,80 | 17.707,30 |
| Pamekasan | 7.429,40 | 7.894,00 | 8.375,20 | 8.846,20 | 9.317,20 | 9.815,80 | 14.640,60 |
| Sumenep | 16.064,80 | 17.665,00 | 20.218,10 | 21.476,80 | 21.750,50 | 22.311,70 | 30.578,70 |
| Kota Kediri | 60.020,10 | 63.185,10 | 65.408,80 | 69.232,90 | 72.945,50 | 76.959,40 | 116.060,20 |
| Kota Blitar | 3.038,40 | 3.236,60 | 3.446,80 | 3.649,50 | 3.857,00 | 4.079,30 | 5.802,40 |
| Kota Malang | 33.273,70 | 35.355,70 | 37.547,70 | 39.724,30 | 41.951,60 | 44.303,90 | 62.359,30 |
| Kota Probolinggo | 5.213,90 | 5.552,10 | 5.911,30 | 6.261,90 | 6.629,10 | 7.018,30 | 9.680,00 |
| Kota Pasuruan | 3.810,70 | 4.051,20 | 4.315,10 | 4.561,10 | 4.813,30 | 5.076,40 | 7.125,20 |
| Kota Mojokerto | 3.165,60 | 3.358,40 | 3.566,70 | 3.774,50 | 3.991,10 | 4.221,50 | 5.848,20 |
| Kota Madiun | 6.494,40 | 6.937,70 | 7.470,70 | 7.965,50 | 8.455,40 | 8.954,70 | 12.140,20 |
| Kota Surabaya | 247.686,60 | 265.892,10 | 286.050,70 | 305.957,30 | 324.227,80 | 343.652,60 | 495.043,30 |
| Kota Batu | 6.968,00 | 7.473,60 | 8.018,60 | 8.572,10 | 9.145,90 | 9.750,90 | 14.351,50 |

Sumber : BPS Jawa Timur, 2017 (data diolah)

LAMPIRAN A4

Data Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2011-2017

| Wilayah | Investasi PMDN Di Jawa Timur 2011-2017 (Juta Rp) | | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Pacitan | 710.117 | 849.358 | 994.300 | 1.039.251 | 1.061.181 | 933.375 | 802.360 |
| Ponorogo | 448.540 | 163.664 | 222.319 | 397.422 | 472.395 | 474.466 | 644.965 |
| Trenggalek | 119.119 | 110.092 | 75.219 | 104.270 | 117.539 | 138.284 | 106.388 |
| Tulungagung | 195.570 | 310.436 | 353.415 | 539.769 | 492.992 | 529.325 | 629.498 |
| Blitar | 101.620 | 155.670 | 205.359 | 248.741 | 257.977 | 317.964 | 348.752 |
| Kediri | 264.749 | 299.309 | 1.834.970 | 415.356 | 394.983 | 417.226 | 528.068 |
| Malang | 469.550 | 594.260 | 1.003.822 | 1.409.442 | 1.484.227 | 1.552.680 | 1.639.182 |
| Lumajang | 214.804 | 167.647 | 156.131 | 223.813 | 353.646 | 472.239 | 642.182 |
| Jember | 2.355.728 | 520.548 | 619.639 | 652.370 | 638.789 | 745.221 | 896.759 |
| Banyuwangi | 370.589 | 325.779 | 321.177 | 475.709 | 717.580 | 1.184.476 | 1.712.261 |
| Bondowoso | 113.739 | 87.177 | 60.584 | 160.792 | 242.065 | 206.576 | 190.475 |
| Situbondo | 34.586 | 63.259 | 90.446 | 104.665 | 115.339 | 105.563 | 109.447 |
| Probolinggo | 235.738 | 386.103 | 159.101 | 132.942 | 158.797 | 432.743 | 349.987 |
| Pasuruan | 292.262 | 423.498 | 790.298 | 1.058.652 | 1.340.009 | 384.332 | 534.397 |
| Sidoarjo | 1.971.209 | 2.695.914 | 3.186.341 | 3.892.343 | 4.226.924 | 4.901.677 | 5.438.501 |
| Mojokerto | 563.209 | 762.263 | 1.026.828 | 1.380.705 | 1.433.913 | 1.248.887 | 1.855.998 |
| Jombang | 88.375 | 167.071 | 261.734 | 342.393 | 385.773 | 475.147 | 779.883 |
| Nganjuk | 85.299 | 130.818 | 132.173 | 167.029 | 176.010 | 198.556 | 242.364 |
| Madiun | 184.594 | 194.047 | 172.582 | 182.447 | 428.401 | 402.285 | 581.905 |
| Magetan | 161.741 | 117.219 | 997.079 | 1.042.458 | 168.716 | 180.938 | 201.751 |
| Ngawi | 132.241 | 136.639 | 108.718 | 171.303 | 220.420 | 248.449 | 927.870 |
| Bojonegoro | 448.540 | 265.462 | 221.115 | 221.115 | 400.272 | 618.990 | 686.486 |
| Tuban | 319.743 | 651.914 | 835.271 | 940.856 | 1.880.309 | 2.030.868 | 1.787.503 |
| Lamongan | 190.921 | 265.676 | 361.450 | 483.831 | 545.329 | 595.416 | 604.423 |
| Gresik | 1.815.702 | 2.192.036 | 2.682.085 | 3.306.614 | 5.155.658 | 7.070.763 | 10.029.496 |
| Bangkalan | 19.488 | 46.965 | 59.966 | 149.453 | 177.323 | 250.420 | 284.421 |
| Sampang | 107.633 | 81.524 | 36.290 | 54.557 | 72.565 | 77.887 | 110.874 |
| Pamekasan | 111.605 | 96.746 | 106.451 | 135.806 | 177.487 | 272.949 | 314.271 |
| Sumenep | 159.380 | 131.261 | 137.569 | 134.794 | 146.201 | 173.040 | 234.534 |
| Kota Kediri | 197.058 | 211.426 | 244.625 | 263.112 | 242.589 | 336.965 | 338.772 |
| Kota Blitar | 32.885 | 58.982 | 64.445 | 64.991 | 79.293 | 110.216 | 116.617 |
| Kota Malang | 592.363 | 785.552 | 1.004.392 | 1.482.429 | 1.647.076 | 1.781.167 | 1.639.182 |
| Kota Proboling | 560.117 | 642.103 | 674.721 | 612.961 | 545.919 | 432.743 | 349.987 |
| Kota Pasuruan | 117.337 | 71.951 | 110.208 | 174.300 | 222.647 | 384.332 | 534.397 |
| Kota Mojokerto | 193.878 | 194.452 | 1.026.828 | 210.184 | 268.973 | 467.098 | 401.140 |
| Kota Madiun | 161.749 | 147.285 | 154.881 | 168.621 | 428.401 | 402.285 | 272.598 |
| Kota Surabaya | 8.466.985 | 11.121.576 | 15.438.042 | 21.111.515 | 23.543.021 | 25.124.041 | 29.177.402 |
| Kota Batu | 18.280 | 76.163 | 103.450 | 166.234 | 186.700 | 220.343 | 207.274 |

Sumber : BPS Jawa Timur, 2017 (data diolah)

LAMPIRAN B**Hasil Analisis Regresi Data Panel *Fixed Effect Model***

Dependent Variable: PTK

Method: Panel Least Squares

Date: 10/01/19 Time: 09:40

Sample: 2011 2017

Periods included: 7

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 266

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-----------|-------------|------------|-------------|--------|
| PTK | 451444.9 | 8028.222 | 56.23224 | 0.0000 |
| UMK | 0.016053 | 0.005031 | 3.191133 | 0.0016 |
| PDRB | 1.196906 | 0.348499 | 3.434460 | 0.0007 |
| INVESTASI | -0.000725 | 0.001846 | -0.392670 | 0.6949 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.995651 | Mean dependent var | 514084.1 |
| Adjusted R-squared | 0.994877 | S.D. dependent var | 310984.3 |
| S.E. of regression | 22257.69 | Akaike info criterion | 22.99964 |
| Sum squared resid | 1.11E+11 | Schwarz criterion | 23.55198 |
| Log likelihood | -3017.952 | Hannan-Quinn criter. | 23.22154 |
| F-statistic | 1287.685 | Durbin-Watson stat | 1.793468 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

LAMPIRAN C**Hasil Uji Chow (Chow Test)**

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|--------------------------|----------|--------|
| Cross-section F | 677.775287 1256.20240 | (37,225) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 1 | 37 | 0.0000 |

Hasil Uji Hausman (Hausman Test)

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

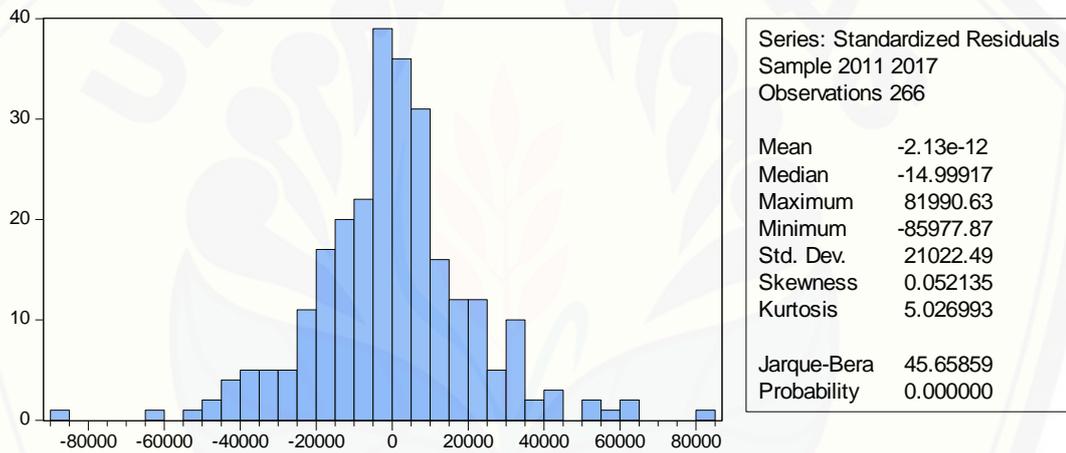
| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|----------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 20.606209 | 3 | 0.0001 |

LAMPIRAN D

Hasil Uji Multikolineritas

| | X1 | LOGX2 | X3 |
|-----------|----------|----------|----------|
| UMK | 1.000000 | 0.561107 | 0.495280 |
| PDRB | 0.561107 | 1.000000 | 0.588152 |
| INVESTASI | 0.495280 | 0.588152 | 1.000000 |

Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Heterokedasitas

Dependent Variable : RESABS
 Method : Panel Least Squares
 Date: 10/01/19 Time: 09:40
 Sample: 2011 2017
 Periods included: 7
 Cross Section include: 38
 Total panel (balanced) observations: 266

Heteroskedasticity Test: Breus Pegan

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 1.182346 | Prob. F(3,262) | 0.3169 |
| Obs*R-squared | 3.553087 | Prob. Chi-Square(3) | 0.3139 |
| Scaled explained SS | 4.346597 | Prob. Chi-Square(3) | 0.2264 |